DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO

REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 - 2021

2018

REVIEW RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2017 - 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018

BERITA ACARA

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Ops. Room Setda-Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan Review Rencana Strategis Tahun 2017 - 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika. Alasan Adanya Review RENSTRA dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan dan Target RENSTRA yang harus menyesuaikan RPJMD.

Dari hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Tahun 2017- 2021 masih dapat digunakan / relevan namun ada perubahan pada target, indiaktor tujuan dan indikator utama akan tetapi masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
2. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2021 masih dapat digunakan / relevan namun ada perubahan pada target, indikator tujuan dan indikator utama akan tetapi masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Untuk Perubahan Perjanjian Kerja/Kinerja, Indikator Kegiatan Utama (IKU) dan Indikator Kegiatan Individu (IKI) akan dilakukan seriring dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) TA. 2019

Demikian kesimpulan hasil review Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2019 ini untuk dapat dipergunakan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Drs. SETYO WINARNO, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19641016 199103 1 010

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021"** dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Diskominfo untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Diskominfo Kabupaten Sidoarjo pada khususnya.

Sidoarjo, 24 Juli 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO

.....

Drs. YOHANES SISWOYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 198501 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I : PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-4
1.3 Maksud Dan Tujuan I-6
1.4 Sistematika Penulisan I-7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO **II-1**
2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi II-1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika II-4
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat II-4
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik II-6
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Informatika II-10
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi II-14
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik II-18
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika II-20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika II-35
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo II-38
2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi

dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur II-38

BAB III: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD..... III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika..... III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-6

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur III-14

3.3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika..... III-14

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur III-17

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis III-20

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1 Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika V-1

5.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika..... V-8

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

6.1 Rencana Program V-1

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin II-21
Tabel 2.2
Sebaran PNS Berdasarkan Eselon II-22
Tabel 2.3
Sebaran PNS Berdasarkan Umur II-24
Tabel 2.4
Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan II-25
Tabel 2.5
Daftar Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo II-27
Tabel 2.6
Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
Periode 2010-2015 ..... II-35
Tabel 2.7
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015..... II-37
Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran
Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L* II-39

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo..... III-3
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah III-12
Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika..... III-16

Tabel 3.4
Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur III-18
Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis III-22
Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria III-22
Tabel 3.7
Rata-Rata Skor Isu Strategis III-23

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target IV-3

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan V-2
Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah (PD) V-10

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif PD Tahun 2017-2021 ..... VI-3
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif OPD Tahun 2019-2021 ..... VI-11

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-2
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-4
Tabel 7.3
Formulasi Perhitungan IKU Diskominfo VII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota I-3

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 ..... II-3
Gambar 2.2
Presentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin II-22
Gambar 2.3
Sebaran PNS Berdasarkan Eselon II-23
Gambar 2.4
Sebaran PNS Berdasarkan Umur II-24
Gambar 2.5
Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan II-26

Gambar 4.1
Casecading Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo IV-6

Gambar 6.1
Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo VI-19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanatkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan perencanaan yang baik dan benar tersebut perlu didasarkan pada profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Sidoarjo. Pada langkah selanjutnya perlu adanya analisis lebih lanjut yang direalisasikan dalam program maupun kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai dan rasional dari anggaran APBD kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah Organisasi Perangkat Daerah baru yang membidangi urusan komunikasi dan informasi serta statistika dan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya Dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *E-Government*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menyusun rencana strategi untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi: ”Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat

Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

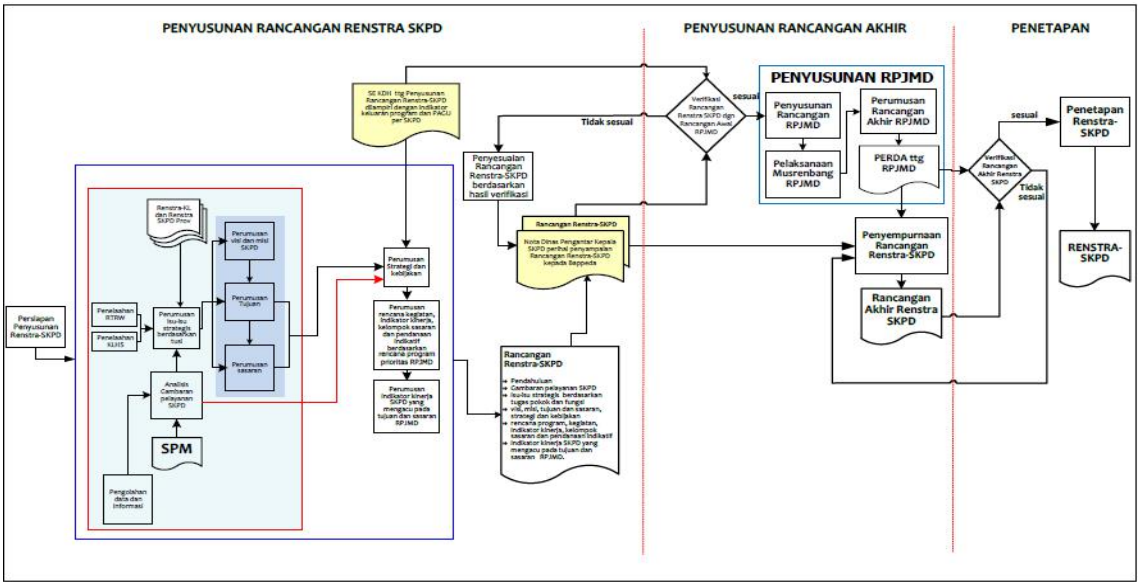

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra OPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan OPD dalam mendukung

prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Renstra OPD dapat dilihat pada gambar bagan alir diatas yang sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien pada masyarakat, swasta, maupun stakeholder lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator, mediator, coordinator, maupun controller sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga dan tepat sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 2017-2021 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
c. Membantu dalam sinkronikasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan Renja/RKT dan RKA-OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Informasi dan Komunikasi

3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Latar belakang terbentuknya OPD Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gabungan dari dua Bagian di Sekda dan dua Bidang di Dinas Perhubungan dan Bappeda. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk "Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten".

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Bidang Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dipimpin oleh seorang Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada dan di bawah dan bertangung jawab dengan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam hal komunikasi dan informatika. Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 akan tetapi Pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo terdapat perubahan Nomenklatur Struktur organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 sebagai berikut :

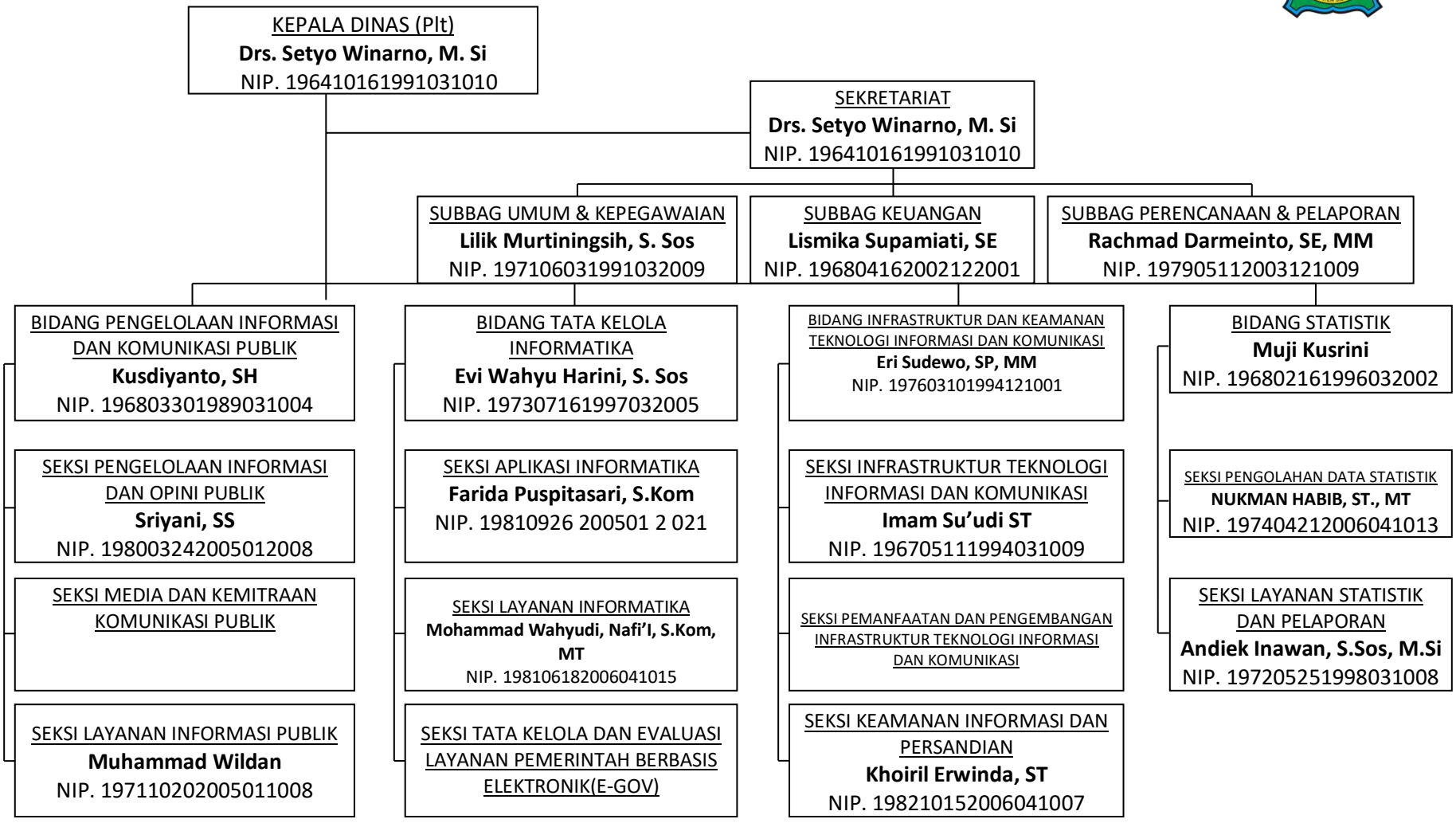

Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, diketahui bahwa, terdapat tiga level yang menyusun struktur organisasi, yang pertama adalah Kepala Dinas, kemudian yang kedua Sekretaris dan yang ketiga Kepala Bidang dan yang terakhir adalah Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi. Masing-masing kepala sub bagian dan kepala seksi dibantu oleh beberapa orang staf dalam menjalankan tugasnya.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta kesekretariatan;
b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada bupati;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Tugas Pokok dari Sekretariat adalah melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan, sedangkan Sekretariat mempunyai Fungsi :

a) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;

b) pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c) pengelolaan administrasi keuangan;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

A. Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
b) Melaksanakan pengelolaan barang;
c) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
d) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan :

a) melaksanakan administrasi keuangan;
b) melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :

a) Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
b) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
c) Menyusun laporan dinas;
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Fungsi yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik antara lain :

a) Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten;
c) Pelayanan Hubungan Komunikasi pemerintahan daerah dan publik kabupaten;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

A. Tugas Pokok Seksi Pengolahan Informasi dan Opini Publik

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan opini publik;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik, meliputi:
    1. Pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di kabupaten;
    2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta

pengelolaan opini dan aspirasi publik di kabupaten;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di kabupaten;
4. Mengelola informasi dan dokumentasi daerah atau sebagai ppid (pejabat pengelola informasi daerah) di lingkup kabupaten;
5. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi hasil-hasil peliputan dan penyiaran dalam bentuk kliping, rekaman, video dan film;
6. Melaksanakan klarifikasi informasi pemberitaan dan opini publik kepada pers/ media massa;
7. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal (spm) pengelolaan informasi dan opini publik;

c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik;

d) Melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas Pokok Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik

Tugas Pokok Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik adalah :

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media dan kemitraan komunikasi publik;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis media dan kemitraan komunikasi publik, meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
4. Melaksanakan fungsi kehumasan terdiri dari peliputan, pembuatan *press release* terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah maupun masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi menggunakan sarana audio video maupun visual dan mendokumentasikannya dalam bentuk multimedia;
5. Memfasilitasi kegiatan ceramah dan dialog rutin maupun insidental tatap muka melalui workshop/lokakarya, anjangsana, sarasehan, diskusi, dan dialog interaktif;

6. Melakukan kerjasama kemitraan dengan media massa (cetak, elektronik, multimedia dan digital);
7. Melakukan pendataan dan fasilitasi pembinaan secara rutin serta berkelanjutan pada wartawan media massa;
8. Melakukan pendataan dan fasilitasi pembinaan secara rutin berkelanjutan pada wartawanmedia massa yang bertugas di kabupaten;

c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis media dan kemitraan komunikasi publik;

d) Menyiapkan Bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik;

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas Pokok Seksi Layanan Informasi Publik

Tugas Pokok Seksi Layanan Informasi Publik adalah :

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informasi publik, meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik di kabupaten;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pelayanan informasi publik di kabupaten;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pelayanan informasi publik di kabupaten;
4. Melaksanakan penyebarluasan informasi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat melalui portal, website, media sosial dan digital pemerintahan kabupaten sidoarjo
5. Melaksanakan dan menyiapkan pembuatan media informasi yang memuat agenda dan kebijakan pimpinan daerah serta Organisasi Perangkat Daerah, Pembangunan, Sosialisasi regulasi dan laian-lain berupa cetak, elektronik, multimedia, dan digital;
6. Melakukan pembentukan, pendampingan dan pembinaan kelompok infomasi masyarakat (kim) tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
7. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi publik lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
8. Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui lapor.go.id, p3m.sidoarjokab.go.id, media sosial

c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan informasi publik;

d) Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan informasi

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Kelola Informatika

Tugas Pokok Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai tugas melaksankan sebagian tugas dinas di Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (E-GOV), yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan, dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Tata Kelola Informatika mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
b) Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan Masyarakat di daerah;
c) Pelaksanaan Layanan Informatika, website, portal, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan public serta Lembaga kabupaten;
d) Pelaksanaan dan fasilitas tugas-tugas GCIO *(Government Chief Information Officer)* di Pemerintah Daerah;
e) Pengkoordinasian Kebijakan Teknis Tata Kelola E-Gov (SPBE/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
f) Pelaksanaan penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city;*
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan informatika;
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

A. Tugas Seksi Aplikasi Informatika

Tugas Seksi Aplikasi Informatika adalah:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis aplikasi informatika, meliputi:

1. Melaksanakan Fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi dari Organisasi Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersifat generic/umumdan berbagai pakai;
3. Melaksanakan Fasilitasi integrasi antar aplikasi baik dari aplikasi sudah ada maupun yang akan dibangun;
4. Membuat platform aplikasi terintegrasi, pembangunan data *warehouse*;
5. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang tertintegrasi di kabupaten;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang terintegrasi di kabupaten;

c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis aplikasi informatika;

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas Seksi Layanan Informatika:

Tugas Pokok Seksi Layanan Informatika :

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informatika;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informatika, meliputi:

1. Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
2. Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan system informasi *smart city*;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
5. Memantau dan mengevaluasi fungsi integrasi layanan informatika bagi pemerintahan kabupaten dan pelayanan publik;
6. Melaksanakan kebijakan terkait fungsi layanan informatika, website, layanan nama domain dan sub domain

c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan informatika;

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik mempunyai tugas:

Tugas Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik :

a) Menyiapkan bahan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Tata Kelola E-Government antara lain :
   1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE;
   2. *Smart City*;

b) Menyusun masterplan, Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kabupaten:

c) Menyiapakan Bahan dan fasilitasi penyelenggaraan *smart city* di kabupaten;

d) Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten;

e) Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas *Government Chief Information Officer (GCIO)*;

f) Menyiapkan bahan pelayanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;

g) Menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan teknis Tata Kelola *E-Government;*

h) Melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Pokok Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a) Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan teknis infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintah kabupaten;
b) Pengkoordinasian, sinkronisasi, fasilitasi dan pengembangan bidang infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
c) Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

A. Tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis infrastruktur dan teknologi informasi, meliputi:
    1. Merencanakan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dasar meliputi jaringan intranet dan internet, *Data Center*, DRC, *Command Center*, *Call Center* dan jaringan telekomunikasi intra pemerintah;

2. Melaksanakan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan intranet dan internet, *Data Center*, DRC, *Command Center, Call Center* dan jaringan telekomunikasi intra pemerintah;
3. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi jaringan intranet dan internet, *Data Center,* DRC, *Command Center, Call Center* dan jaringan telekomunikasi intra pemerintah;
4. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
5. Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyediaan dan pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis infrastruktur dan teknologi informasi;

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

b) menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meliputi:

1. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait pemanfaatan dan pemngembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Melakukan perencanaan dan Pelaksanaan integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi *Data Center*, jaringan intranet dan internet, *Command Center* dan jaringan telekomunikasi intra pemerintah;
3. Melaksanakan layanan hosting dan *collocation server* perangkat daerah;
4. Melakukan pengelolaan *Network Operarion Center* (NOC) dan *helpdesk* pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
5. Melaksanakan fasilitasi back-up dan restore data di *Data Center* dan DRC;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait pemanfaatan dan pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

c) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Tugas Seksi Keamanan Informasi dan Persandian adalah:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian, meliputi;

1. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian di kabupaten;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan keamanan informasi dan persandian;
3. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang keamanan informasi dan persandian ;
4. Melakukan peningkatan kesadaran (*awareness*) keamanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;
5. Melakukan pemanfaatan sertifikat elektronik pada pemerintah kabupaten;

6. Melaksanakan identifikasi dan penilaian (assessment) kerentanan kemanan informasi *e-government*;
7. Melaksanakan penguatan (*hardening*) perangkat sistem keamanan informasi *e-government*;
8. Melaksanakan fasilitasi penanganan dan pemulihan insisen keamanan informasi *e-government*;
9. Melaksanakan operasional persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perngkat persandian dan jaring komunikasi sandi;
10. Melaksanakan audit keamanan informasi perangkat daerah;
11. Melaksanakan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi;
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian

c) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

d) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian;

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik

Tugas Pokok Bidang Statistik adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Statistik. Bidang Statistik mempunyai fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis statistik;
b) pelaksanaan kegiatan statistik;
c) pelaporan pelaksanaan kegiatan statistik;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

A. Tugas Seksi Pengolahan Data

Tugas Seksi Pengolahan Data adalah:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data statistik;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan data statistik, meliputi:
    1. Pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengolahan data statistik di kabupaten;
    2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengolahan data statistik di kabupaten;
    3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengolahan data statistik di kabupaten;
c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data statistik;
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan statistik dan pelaporan;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan statistik dan pelaporan, meliputi:
    1. Pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan statistik dan pelaporan di kabupaten;
    2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi layanan statistik dan pelaporan di kabupaten;
    3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan statistik dan pelaporan di kabupaten;
c) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
d) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan statistik dan pelaporan;
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Kesimpulan dari SOTK yang berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dimana Dinas ini merupakan dinas baru gabungan dari Bagian Humas dan Bagian Telematika Sekretariat Daerah serta Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda. Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 4 Bidang dan 1 Sekretariat

membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki kekuatan Sumber Daya Manusia / SDM untuk Pegawai Negeri Sipil / PNS sebanyak 52 (lima puluh) orang yang terdiri dari pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 30 orang sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 22 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Eselon	Jumlah	%
1	Laki-Laki	30	58
2	Perempuan	22	42
	J U M L A H	52	100

Data tabel sebaran PNS berdasarkan jenis kelamin diatas, menunjukkan bahwa proporsi persentase laki-laki lebih

besar dibandingkan perempuan. Proporsi persentase jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58% sedangkan proporsi persentase jumlah PNS berjenis kelamin perempuan sebanyak 42%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.1 berikut.

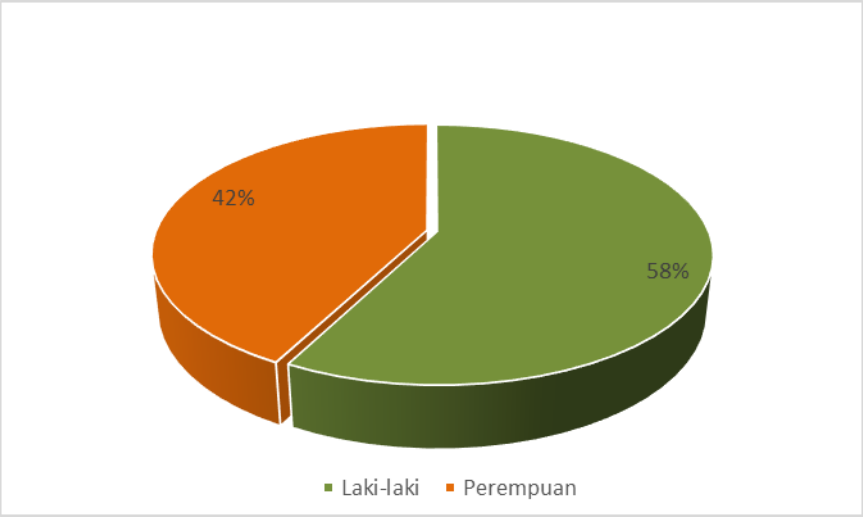

Gambar 2.2
Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Data sebaran PNS berdasarkan eselon di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa jumlah pegawai eselon II/a sejumlah 1 orang; jumlah pegawai eselon III/a sejumlah 5 orang; jumlah pegawai eselon IV/a sejumlah 17 orang; jumlah staf sejumlah 29 orang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2
Sebaran PNS Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	%
1	Eselon II/a	1	2
2	Eselon III/a	5	9
3	Eselon IV/a	17	33
4	Staf	29	56
	J U M L A H	52	100

Berdasarkan gambar 2.2 diketahui bahwa PNS berdasarkan eselon terbanyak pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah staf dengan persentase sebesar 58%, sedangkan eselon terendah pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah eselon II/a dengan persentase sebesar 2%. Selain itu, persentase pegawai eselon III/a sebesar 10% dan persentase pegawai eselon IV/a sebesar 33%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut.

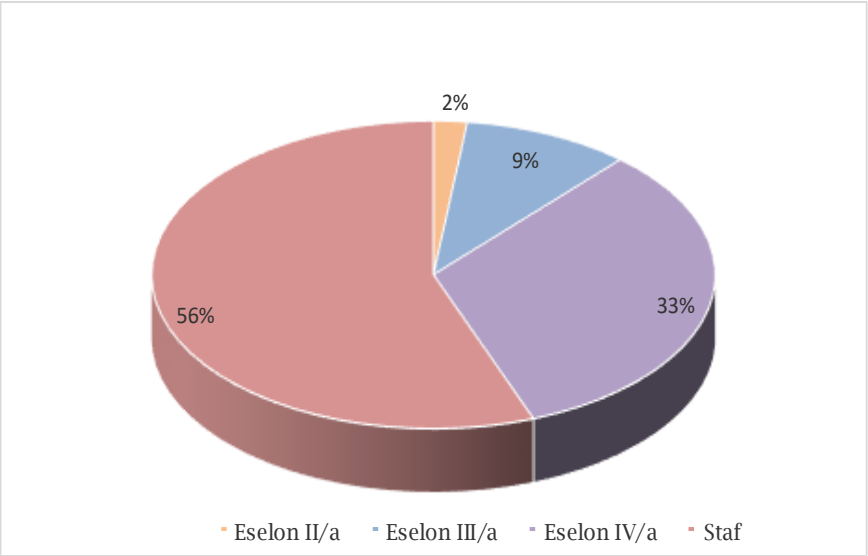

Gambar 2.3
Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Eselon

Data sebaran PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berdasarkan umur didominasi oleh

golongan umur 41-50 tahun dengan jumlah sebanyak 28 pegawai. Sedangkan dominasi kedua pegawai golongan umur 31-40 tahun sebanyak 10 pegawai, ketiga golongan umur 51-55 tahun sebanyak 8 pegawai, golongan umur >56 tahun sebanyak 4 pegawai, dan golongan umur 25-30 tahun sebanyak 2 pegawai. Kondisi ini menggambarkan bahwa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh pegawai yang terbilang cukup berpengalaman, sehingga akan sangat mungkin berimplikasi positif terhadap kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3
Sebaran PNS Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	%
1	25 - 30 th	2	4
2	31 - 40 th	10	19
3	41 - 50 th	28	54
4	51 - 55 th	8	15
5	> 56 th	4	8
	J U M L A H	52	100

Berdasarkan gambar 2.3. berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan usia sebagai berikut persentase golongan umur 41-50 tahun sebesar 54%; persentase golongan umur 31-40 tahun sebesar 19%, persentase golongan umur 51-55 tahun sebesar 15%, persentase golongan umur >56 tahun sebesar 8%, dan persentase golongan umur 25-30 tahun sebesar 4%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut.

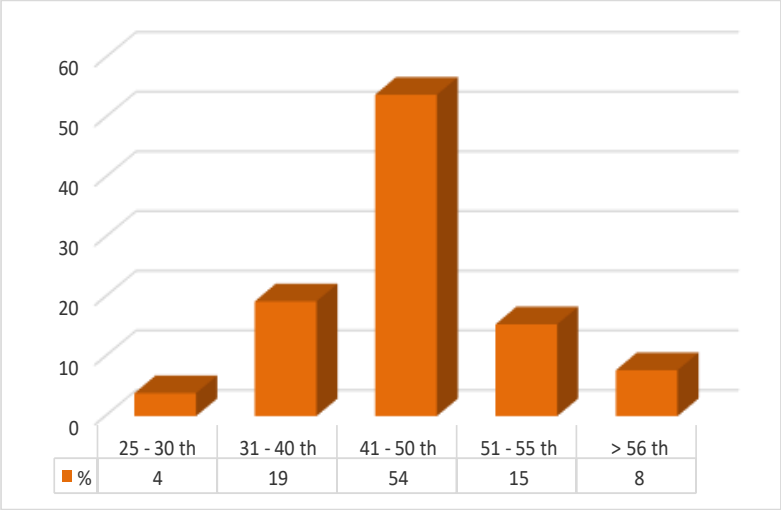

Gambar 2.4
Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Umur

Jika melihat tabel tersebut diatas, sebaran berdasarkan komposisi pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, jumlah pegawai yang paling tinggi adalah pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 24 orang; pegawai yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebanyak 18 orang; pegawai berpendidikan Magister (S2) menempati urutan ketiga sebanyak 4 orang; serta pegawai yang berpendidikan Diploma III (DIII) sebanyak 6 orang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan PNS	Jumlah	%
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	18 orang	35
4	D III	6 orang	12
5	S 1	24 orang	46
6	S 2	4 orang	8
	Jumlah	52 orang	100

Berdasarkan gambar 2.4. berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan pendidikan sebagai berikut persentase pendidikan pegawai SD dan SLTP sebanyak 0 orang; persentase pendidikan pegawai SLTA sebanyak 35%; persentase pendidikan pegawai DIII sebanyak 12%; persentase pendidikan pegawai S1 sebanyak 46%; persentase pendidikan pegawai S2 sebanyak 8%; Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.5. berikut.

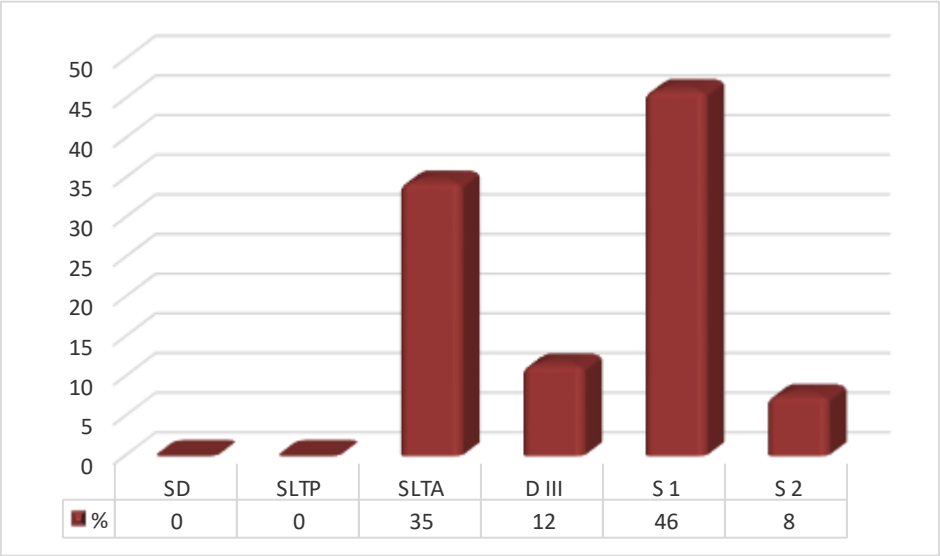

G

Gambar 2.5
Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipunyai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dengan sebagian besar SDM memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 46%. Akan tetapi masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT, khususnya programmer. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sidoarjo mengalami kesulitan transfer *source code* jika terjadi pergantian programmer untuk aplikasi pengaduan.

2. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/kegiatan. Dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas baru, maka saran parasarana yang ada masih dalam proses pelimpahan aset.

Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	**SEKRETARIAT :**			
	Meja 1/2 biro	15 buah	baik	Sekretariat
	Meja 1/2 biro kecil	9 buah	baik	
	Meja Biro (besar)	3 buah	baik	
	Kursi lipat	14 buah	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kur si Putar	3 buah	rusak	
	Kursi eselon	1 buah	baik	
	Kompter besar PC (Lenovo)	2 unit	baik	
	Komputer PC (LG)	2 unit	baik	
	Almari besi besar (Quanthum)	1 buah	baik	
	Pilling Kabinet Besi	1 buah	baik	
	Pilling Kabinet Kayu	2 buah	baik	
	Almari kayu	1 buah	baik	
	TV " 24 (Panasonic)	1 unit	rusak berat	
	Printer DOG Matrik	1 unit	rusak	
	Printer Lazer Zet (Brother)	1 unit	baik	
	Printer Lazer Zet Besar (HP)	1 unit	baik	
	Printer Lazer Zet (HP)	1 unit	baik	
2	**BIDANG TATA KELOLA INFORMATIKA :**			
	PC Allin One (Lenovo)	2 unit	baik	
	PC Komputer Biasa (Intel)	3 unit	baik	
	Printer (HP Laserjet M 1522 NF)	1 unit	baik	
	Printer (Epson) L 800	1 unit	baik	
	Scanner (HP 64060)	1 unit	baik	
	Mesin Tik Brother 168	1 unit	baik	
	Switch (Allied Telesyn AT-8026 T)	1 unit	baik	
	TP Link Swith	1 unit	baik	
	Swith (D- Link)	1 unit	baik	
	Meja Kecil	8 buah	baik	
	Meja Besar	3 buah	baik	
	AC Panasonic	1 unit	baik	
	Kursi	8 buah	baik	
	Kursi putar	3 buah	baik	
	Kursi Eselon	1 buah	baik	
	Komputer Notebook	1 buah	baik	
	Pengadaan Hardisk Eksternal	1 buah	baik	
	Access Point	1 buah	baik	
	Camera Mirroles X-E2S Kit1-	1 buah	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Silver			
	Komputer /PC	1 buah	baik	
	Harddisk Enclosure Docking	1 buah	baik	
3	**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI :**			
	Meja kerja	10 buah	baik	
	Meja Komputer	1 buah	baik	
	Pilling Kabinet	4 buah	baik	
	AC	6 unit	baik	
	Kursi putar Eselon 3	1 unit	baik	
	Kursi putar staf	9 buah	baik	
	Kursi lipat	1 buah	baik	
	Kursi	3 buah	baik	
	PC	2 unit	baik	
	PC AM IN ONE	2 unit	baik	
	Monitor PC	2 unit	baik	
	Printer (Epson L120)	1 unit	baik	
	Almari Kayu	3 unit	baik	
	Central BNS (terminal PBX)	1 unit	rusak	Ruang Santel
	Battery (power Recovery, Syitem)	1 unit	rusak	
	Komputer PBX System	1 unit	rusak	
	Raximile	1 unit	rusak	
	Santel AFF.RSW.16	1 unit	rusak	
	Werelesi Router	1 unit	rusak	
	Komputer ALL In One	1 unit	rusak	
	Boximil KFP LX MB2062	1 unit	rusak	
	Meja kerja 1/4 Biro	4 buah	baik	
	Meja kerj 1/2 Biro	2 buah	baik	
	Raximile MFC 7860 DW	1 unit	baik	
	Komputer PC	2 unit	rusak	
	Pilling Kabinet	1 buah	baik	
	Almari Alumunium	1 buah	rusak	
	Kursi	9 buah	baik	
	PABX	2 unit	rusak	
	Sambungan Telfon	1 unit	baik	
	APC-Smart-UPS (SMX3000HVNC)	2 unit	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	APC-Smart-UPS (SMX3000HVNC)	2 unit	baik	
	Strorage	1 unit	baik	
	Server	1 unit	baik	
4	**BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			
	Kursi kerja	4 buah	baik	
	Laci kayu	1 buah	baik	
	lemari besi	3 buah	baik	
	Meja Kerja	12 buah	baik	
	Printer Epson LX-310	2 unit	baik	
	Komputer PC	6 unit	baik	
	Layar komputer	5 unit	baik	
	Komputer PC HP	2 Unit	baik	
	Printer Epson LX-300 + 11	2 unit	baik	
	Speker Active Simbadda	1 unit	baik	
	TV 20 "	1 unit	baik	
	Dispenser Modena	1 buah	baik	
	Printer Laser Jet M 1212 NF	2 unit	baik	
	Komputer Layar & CPU HP	1 unit	baik	
	Komputer Layar & CPU LG	1 unit	baik	
	Printer HP Laser Jet P1102	1 unit	baik	
	Printer Epson L 200	1 unit	baik	
	Komputer layar & CPU Sambung	1 unit	baik	
	Komputer Layar & CPU HP Pavilion 20 Fi	1 unit	baik	
	Brankas Sargent Safe	1 unit	baik	
	Notebook Asus A456URGA092D	2 Unit	baik	
	AC	4 unit	baik	Ruang P3 M
	AC	1 unit	rusak	
	Tape Combo Sharp CD-BA 2300 V	1 set	baik	
	Almari Rak	1 buah	baik	
	Almari kecil kayu	1 buah	baik	
	Almari Hardbot kayu	1 buah	baik	
	TV Panasinic	1 unit	baik	
	Sofa + Meja	1 set	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kursi tunggu besi	2 buah	baik	
	Tirai	10 m	baik	
	Papan rekap aduan	1 buah	baik	
	Jam dindiing	1 buah	baik	
	Kursi lipat besi	5 buah	4 baik, 1 rusak	
	Kursi putar	4 buah	3 baik, 1 rusak	
	Sound + Tape Polytron	1 set	baik	
	Wireles AW-660 Toa Corporation	1 set	rusak	
	Laptop Accer	5 unit	baik	
	komputer Server	1 unit	rusak	
	Komputer Pentium IV	2 Unit	rusak	
	Meja komputer Olympic	1 buah	baik	
	Meja Pelayanan P3M	1 set	baik	
	Printer HP Laser Jet P2055DN	1 unit	baik	
	Printer HP Laserjet 1010	1 unit	rusak	
	Telephone	3 buah	baik	
	Telephone + Faximile	1 buah	rusak	
	UPS	8 buah	rusak	
	Stavolt	1 buah	baik	
	Switch hub Allied Teleksis AT-8000 S	1 unit	baik	
	Fast Ethernet media converter MC 102 XL	1 unit	baik	
	Fast Ethernet Switch AT-FSW 708 Merk Allied	1 unit	rusak	
	Adaptor + charger SKR 5 A	1 buah	rusak	
	Switch hub /fat ethernet Prolink PSW810	1 buah	baik	
	Pengadaan Handycam Sony HXR NX 100 full	1 buah	baik	
	Dry box	1 buah	baik	
	Komputer dell inspiron One 3064/CV.AA Brother	1 buah	baik	
	Instalasi Ruang Server	1 buah	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pemadam Kebakaran Hydran	1 buah	baik	
5	**BIDANG STATISTIK**			
	Meja	5 buah	rusak	
	Meja Komputer	1 buah	rusak	
	Filling Kabinet besi	1 buah	rusak	
	AC	1 unit	rusak	
	Kursi putar Eselon 3	1 buah	rusak	
	Kursi lipat	7 buah	rusak	
	Kursi	1 buah	rusak	
	Komputer Lenovo	1 unit	baik	
	Printer HP Laserjet P 1102 W	1 unit	baik	
6	**ALAT -ALAT ANGKUTAN**			
	Roda 4	7 unit	baik	
	Roda 2	9 unit	baik	
7	**GEDUNG SUARA SIDOARJO**			Mutasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
	Gedung RSPD	3.320 M2	baik	
	Pondasi menara Grounding System Radio Active Tower RSPK Sidoarjo		baik	
	Alat Pengukur Radiasi menara Telekomunikasi		baik	
	Global Psitioning System(GPS)		baik	
	Laser Distance Meter (LDM)		baik	
	Alat Pengukur Elevasi Tanah		baik	
	Software/data Masterplan		baik	
	Zona Cell Planning		baik	
	Data Site Menara Telekomunikasi Eksisting			
	Radio Pemancar FM	1 Paket	baik	
	Audio Vidio Transmite Link	1 Paket	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Audio Vidio untuk siaran	1 Paket	baik	
	Wireles	1 unit	baik	
	tabung pemancar	1 unit	baik	
	Kabel Elektronik	1 unit	baik	
	behringer feedback	1 unit	baik	
	behringer fbg3102	1 unit	baik	
	mic vocal	1 unit	baik	
	mic vocal	2 unit	baik	
	headpjone	3 buah	baik	
	Compressor	1 unit	baik	
	Audio mixer	1 unit	baik	
	Kabel	1 set	baik	
	Mixer	1 set	baik	
	Instalasi	1 set	baik	
	Lampu Chromakey	1 set	baik	
	Luxman light	1 set	baik	
	Seting lighting	1 set	baik	
	Newtex TV	1 unit	baik	
	Monitor TV 15"	1 unit	baik	
	Monitor TV 15"	2 unit	baik	
	Monitor TV 15"	3 unit	baik	
	Video Mixer	1 unit	rusak berat	
	Tripot Camera	1 unit	baik	
	Tripot Camera	1 unit	baik	
	Antena IV/V Input and Output Conectors Antena Coupling	1 set	baik	
	Meja Tulis	10 buah	rusak berat	
	Meja Tulis komputer Olympic	1 buah	rusak berat	
	Mixer soundcrap	1 buah	rusak berat	
	AC Split LG	1 unit	rusak berat	
	AC	1 unit	rusak berat	
	Speaker Altec	1 unit	baik	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Box pemancar radio AM	1 unit	rusak berat	
	Box pemancar radio FM	1 unit	rusak berat	
	Genset 20 PK	1 unit	rusak berat	
	Lambang Garuda	1 buah	baik	
	Standing Mic Panjang	1 buah	rusak berat	
	DVD Karaoke	1 Set	baik	
	Mesin potong rumput	1 buah	rusak berat	
	AC	5	rusak berat	
	Scanner	1 unit	rusak berat	
	UPS 6 KVA	1 unit	rusak berat	
	Meja siaran	3 buah	rusak berat	
	Kamera master HDVDHVRHD	3 unit	rusak berat	
	Handy talkie	11 Unit	rusak berat	
	Monitor TV 15"	4 unit	baik	
	Preamp Multimix	1 unit	baik	
	Sreen Chromakey+seting studio	1 set	rusak berat	
	Seting r.master control	1 set	rusak berat	

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana. Dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas baru penggabungan dari Humas, Bappeda dan Dinas Perhubungan namun tidak terdapat capaian kinerja pada periode sebelumnya.

Tabel 2.6

Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Periode 2010-2015

No	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Renstra SKPD pada tahun-					Realisasi Capaian pada tahun-					Rasio Capaian pada tahun-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1																

*belum tersedia data

b. Pengukuran Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran melalui APBD pada periode 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

**belum tersedia data*

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO

Strategi merupakan uraian mengenai langkah atau upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan maupun program-program. Untuk itu strategi dapat dikatakan merupakan faktor penentu dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo secara efektif dan efisien dalam waktu tahun 2017 – 2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdapat 2 dokumen yang menjadi dasar dalam menentukan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Telaah yang dilakukan antara lain telaah renstra Kementerian Kominfo dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Dalam menelaah capaian sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo diperlukan data terkait data capaian kinerja perangkat kerja pada periode sebelumnya. Capaian kinerja tersebut nantinya akan ditelaah apakah sudah sinergis, telah berkontribusi dan bagaimana capaian tersebut dibandingkan dengan target pada renstra kementerian komunikasi dan informatika dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi perangkat daerah baru di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, maka belum terdapat data tentang capaian kinerja sebelumnya.

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L*

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Sidoarjo	Sasaran pada renstra Diskominfo Provinsi Jatim Tahun 2009-2014	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015-2019
1				

*belum tersedia data

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Total terdapat 6 kolom pada tabel 3.1. Kolom pertama berisikan tentang aspek kajian yakni aspek-aspek kajian yang telah dilakukan yakni kajian terhadap renstra K/L atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kajian terhadap Resntra OPD Provinsi yakni Dinas Komuniksi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kolom 2 berisikan tentang capaian kinerja OPD. Data capaian kinerja ini bersumber dari Data Dinas Komunikasi dan Informatika. Kolom 4 dan 5 berisikan tentang faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan diluar kewenangan OPD. Sumber data untuk kolom 4, 5 dan 6 adalah hasil diskusi dengan pemangku kepentingan atau pejabat struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam mengidentifikasi permasalahan, juga dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi untuk mencapai target kinerja. Faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo antara lain :

a. Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru.

b. Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer source code.
c. Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan jaringan dan aplikasi ke Diskominfo.
d. Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada performa Data Center.

Untuk menjawab permasalahan tersebut kewenangan yang dapat dikendalikan oleh OPD atau faktor internal adalah :

a. Diskominfo melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS.
b. Menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.
c. Menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo.
d. Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.
e. Diskominfo perlu membangun data center baru.

Sedangkan kewenangan yang tidak dapat dikendalikan oleh OPD atau faktor eksternal adalah :

a. Penambahan anggaran, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun indikator.
b. Rendahnya komitmen dari masing-masing OPD untuk mengintegrasi infrastruktur dengan Diskominfo.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Diskominfo
			Internal (Kewenangan Diskominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Diskominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika : "Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam			a. Diskominfo melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS. b. Menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional	a. Penamba-han anggaran, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun indikator. b. Rendahnya komitmen dari masing-masing OPD	a. Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru. b. Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer source code. c. Belum adanya regulasi untuk OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Diskominfo
			Internal (Kewenangan Diskominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Diskominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan”			terkait pembuatan aplikasi pengaduan. c. Menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo. d. Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur	untuk mengintegrasi infrastruktur dengan Diskominfo.	agar mengintegrasikan ke Diskominfo. d. Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo. e. Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada performa Data Center. f. Adanya beberapa indikator yang
Kajian Renstra Diskominfo Jatim : “Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan publik”	a. 14 media harian b. 6 media online c. 6 KIM yang terbentuk (33%)	SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten			

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Diskominfo
			Internal (Kewenangan Diskominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Diskominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Diskominfo. e. Diskominfo perlu membangun data center baru.		belum dapat disusun.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah "Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani". Sehubungan dengan itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 ini adalah **"Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan"**.

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Mandiri: Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
b. Sejahtera: Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan, baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM.
c. Berkelanjutan: Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan".

Sedangkan point inovatif merupakan jiwa semangat yang akan digunakan untuk mencapai ketiga unsur tersebut.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 5 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Adapun 5 misi tersebut adalah:

Misi 1:

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

1.1 Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik.

1.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik.

1.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata.

1.2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

1.2.1 Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik.

Misi 2:

Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

2. 1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

2.1.1 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental.

2. 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

2.2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2.2.2 Meningkatnya kontribusi sektor potensial.

2.2.3 Meningkatnya kontribusi sektor primer.

2.2.4 Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif.

2. 3 Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo.

2.3.1 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo.

2. 4 Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengagguran.

2.4.1 Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran.

2.5 Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo.

2.5.1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah.

2.6 Meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

2.6.1 Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.

2.6.2 Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian pembangunan dan kesejahteraan keluarga.

Misi 3:

Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3.1 Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

3.1.1 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

3.1.2 Terwujudnya pendidikan yang merata.

3.2 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

3.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata.

Misi 4:

Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

4.1 Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib

4.1.1 Meningkatnya harmonisasi social, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4.1.2 Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat.

4.1.3 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum dan demokrasi.

4.2 Meningkatkan peran budaya lokal dan pemuda dalam pembangunan.

4.2.1 Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan.

4.2.2 Meningkatkan peran serta dan prestasi kepemudaan.

Misi 5:

Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang memacu dan memicu egiatan perekonomian.

5.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang.

5.1.2 Terwujudnya lingkungan yang aman dan sehat.

5.2 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat.

5.2.1 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui : Pernyataan Misi ke 1 diatas :***"Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparansi"*.**

Untuk mewujudkan Misi tersebut Diskominfo melakukan 4 program antara lain :

1. Program pelayananan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
2. Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika

3. Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
4. Program Pengembangan data informasi statistik daerah

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru, pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer *source code*, belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo, belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo, adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada performa Data Center dan adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu diupdate dengan OS yang baru adalah karena Diskominfo masih menggunakan OS lama. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah Diskominfo perlu menganggarkan untuk upgrade OS.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan kedua yakni pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer *source code* adalah belum adanya rumusan kebijakan terkait pelayanan pengaduan. Faktor pendorong dari permasalahan tersebut adalah dengan menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan ketiga yakni belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo adalah belum adanya payung hukum pengintegrasian. Faktor pendorong dari permasalahan tersebut adalah dengan menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan keempat yakni belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo dan belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo. Faktor pendorong dari permasalahan tersebut adalah dengan Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan kelima yakni adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu yang akan dibangun yang berdampak pada performa Data Center adalah pembangunan gedung pemerintahan baru dapat menyebabkan kinerja server turun. Faktor pendorong dari permasalahan tersebut adalah Diskominfo perlu membangun data center baru.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan keenam yakni adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun adalah adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Diskominfo. Faktor pendorong dari permasalahan tersebut adalah penambahan anggaran, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun indikator.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No.	Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan			
	1.Program Pelayanan Informasi Dan Pemberitaan Dan Pengaduan Masyarakat	1.1 Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru. 1.2 Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer source code.	1.1 OS masih menggunakan versi lama 1.2 Belum adanya rumusan kebijakan terkait pelayanan pengaduan	1.1 Diskominfo melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS. 1.2 Menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.
	2. Pengembangan	2. Belum adanya regulasi	2. Belum adanya payung	2. Menyusun rumusan

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No.	Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Teknologi Informatika	untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo.	hukum pengintegrasian	kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo.
	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur TIK	3.1 Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo. 3.2 Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada Data Center.	3.1 Belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo 3.2 Pembangunan gedung pemerintahan baru dapat menyebabkan kinerja server turun	3.1 Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo. 3.2 Diskominfo perlu membangun data center baru.
	4. Penyusunan Data Statistik Daerah	4. Adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun	4. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Diskominfo	4. Penambahan anggaran, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun indikator.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran pada renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah penjabaran tujuan dan sasarannya.

3.3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sinergis dengan renstra Diskominfo Kabupaten Sidoarjo adalah "Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan". Permasalahan yang muncul pada Diskominfo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru dan belum adanya standar perumusan pelayanan aplikasi pangaduan. Faktor yang dapat menghambat pelayanan OPD dan mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut adalah karena OS yang digunakan oleh Diskominfo masih versi lama dan belum adanya rumusan kebijakan terkait dengan pelayanan sehingga tidak adanya prosedur yang jelas ketika terjadi pergantian operator atau sistem. Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut Diskominfo perlu menyusun

rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.

Sasaran renstra Kementerian selanjutnya yang sinergis dengan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo adalah "Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi yang efisien, berdaya saing dan aman". Permasalahan yang muncul pada Diskominfo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo, belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo, adanya rencana pembangunan gedung baru pemerintahan terpadu yang akan berdampak pada Data Center. Faktor yang dapat menghambat pelayanan OPD dan mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut adalah belum adanya payung hukum pengintegrasian, belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo, pembangunan gedung pemerintahan baru dapat menyebabkan kinerja server turun. Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut perlu menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo, menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo, dan membangun data center baru.

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk melihat kesesuaian strategis tersebut dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	a. Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru. b. Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer *source code*.	a. OS masih menggunakan versi lama b. Belum adanya rumusan kebijakan terkait pelayanan pengaduan	a. Diskominfo melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS. b. Menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.
2	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi yang efisien, berdaya saing dan aman	a. Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo. b. Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo c. Adanya rencana pembangunan	a. Belum adanya payung hukum pengintegrasian b. Belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo c. Pembangunan gedung pemerintahan baru dapat menyebabkan kinerja server	a. Menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo. b. Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo. c. Diskominfo

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada Data Center.	turun	perlu membangun data center baru.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan renstra Diskominfo Kabupaten Sidoarjo adalah "Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan publik". Permasalahan yang muncul pada Diskominfo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru dan pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer *source code*. Faktor yang dapat menghambat pelayanan OPD dan mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut adalah karena OS yang digunakan oleh Diskominfo masih versi lama dan belum adanya rumusan kebijakan terkait dengan pelayanan sehingga tidak adanya prosedur yang jelas ketika terjadi pergantian operator atau sistem. Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut Diskominfo perlu melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS dan menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.

Sasaran renstra Diskominfo provinsi selanjutnya yang sinergis dengan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo adalah "Meningkatnya

pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik". Permasalahan yang muncul pada Diskominfo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo, belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo, adanya rencana pembangunan gedung baru pemerintahan terpadu yang akan berdampak pada Data Center. Faktor yang dapat menghambat pelayanan OPD dan mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut adalah belum adanya payung hukum pengintegrasian, belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo, pembangunan gedung baru pemerintahan terpadu dapat menyebabkan kinerja server turun. Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut perlu menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo, menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo, dan membangun data center baru. Berikut adalah tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yaitu:

Tabel 3.4
Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan publik	a. Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS	a. OS masih menggunakan versi lama b. Belum adanya rumusan kebijakan terkait pelayanan pengaduan	a. Diskominfo melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS. b. Menyusun rumusan kebijakan terkait

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang baru. b. Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer *source code.*		pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.
2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	d. Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo. e. Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo f. Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada Data Center.	d. Belum adanya payung hukum pengintegrasian e. Belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo f. Pembangunan gedung pemerintahan baru dapat menyebabkan kinerja server turun	d. Menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo. e. Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo. f. Diskominfo perlu membangun data center baru.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diketahui faktor pendorong dan penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo antara lain :

Faktor Penghambat :

a. OS masih menggunakan versi lama
b. Belum adanya rumusan kebijakan terkait pelayanan pengaduan
c. Belum adanya payung hukum pengintegrasian
d. Belum adanya payung hukum pemanfaatan infrastruktur Diskominfo
e. Pembangunan gedung pemerintahan baru dapat menyebabkan kinerja server turun
f. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Diskominfo

Sedangkan faktor pendorong dari Renstra Kementerian Komunikasi dan informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur antara lain :

a. Diskominfo melakukan penganggaran untuk meng-Upgrade OS.
b. Menyusun rumusan kebijakan terkait pembuatan aplikasi pengaduan atau membuat standar operasional terkait pembuatan aplikasi pengaduan.
c. Menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Diskominfo.
d. Menyusun rumusan kebijakan agar OPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.
e. Diskominfo perlu membangun data center baru.
f. Penambahan anggaran, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun indikator.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

a. Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru.
b. Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer *source code*.
c. Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo.
d. Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.
e. Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada Data Center.
f. Adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
   a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
   b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu ditangani	25
Total		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Niai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru.	560	342,75	442	230,5	463	226,5	2264,75
2	Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer source code.	575	339,75	433	224	444	218,5	2234,25
3	Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo.	573,75	344,25	422	227,5	429	223,5	2220
4	Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.	583,75	350,25	436	227	451	223,5	2271,5
5	Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada	560	327	449	218	425	225	2204

No	Isu Strategis	Niai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	performa Data Center.							
6	Adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun.	560	333	427	210	439	208,5	2177,5

Tabel 3.7
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru.	2264,75	141,5
2	Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer source code.	2234,25	139,6
3	Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo.	2220	138,8
4	Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.	2271,5	142,0
5	Adanya rencana pembangunan gedung pemerintahan terpadu baru yang akan berdampak pada performa Data Center.	2204	137,8
6	Adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun.	2177,5	136,1

Dari kuesioner yang diambil dari para pengambil kebijakan (eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, maka urutan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan performa OS pengaduan P3M karena aplikasi yang perlu di update dengan OS yang baru.
2. Pergantian programmer aplikasi pengaduan mengakibatkan kesulitan transfer source code.
3. Belum adanya regulasi untuk OPD agar mengintegrasikan ke Diskominfo.

4. Belum adanya regulasi untuk OPD agar memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.
5. Adanya rencana pembangunan gedung baru pemerintahan terpadu yang akan berdampak pada performa Data Center.
6. Adanya beberapa indikator yang belum dapat disusun.

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memprioritaskan program peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur TIK sebagai langkah untuk agar para OPD di Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh Diskominfo.

BAB IV
TUJUAN DAN SARAN

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2026. Adapun visi RPJP Kabupaten Sidoarjo adalah "Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani". Sehubungan dengan itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 ini adalah "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

Dalam mewujudkan visi maka perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Adapun 5 misi tersebut adalah:

1. Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaran pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandaskan

keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendorong tercapainya visi pembangunan kabupaten Sidoarjo, maka peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika terletak pada misi 1 (pertama) yakni **Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan**.

Guna menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran OPD. Berikut dirumuskan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

"Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smart City"

Selain tujuan OPD dirumuskan sasaran. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi							
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target capaian kinerja**			
				2018	**2019**	**2020**	**2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	58%	70%	81%	100%
			Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi	24%	44%	64%	84%
			Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi	20%	40%	60%	80%
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	77.00	79.00	81.00	83.00

Gambar 4.1

Casecading Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

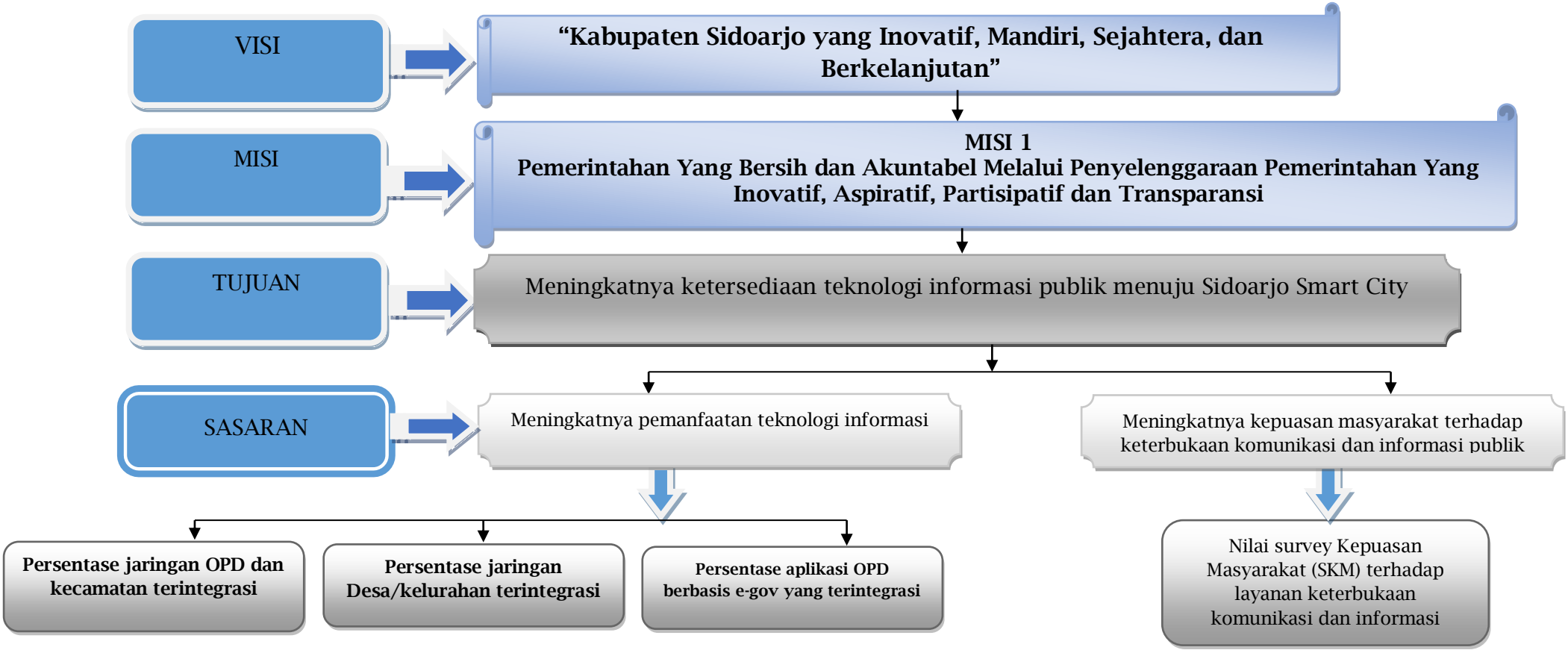

Gambar 4.2

Proses Bisnis Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Lanjutan……

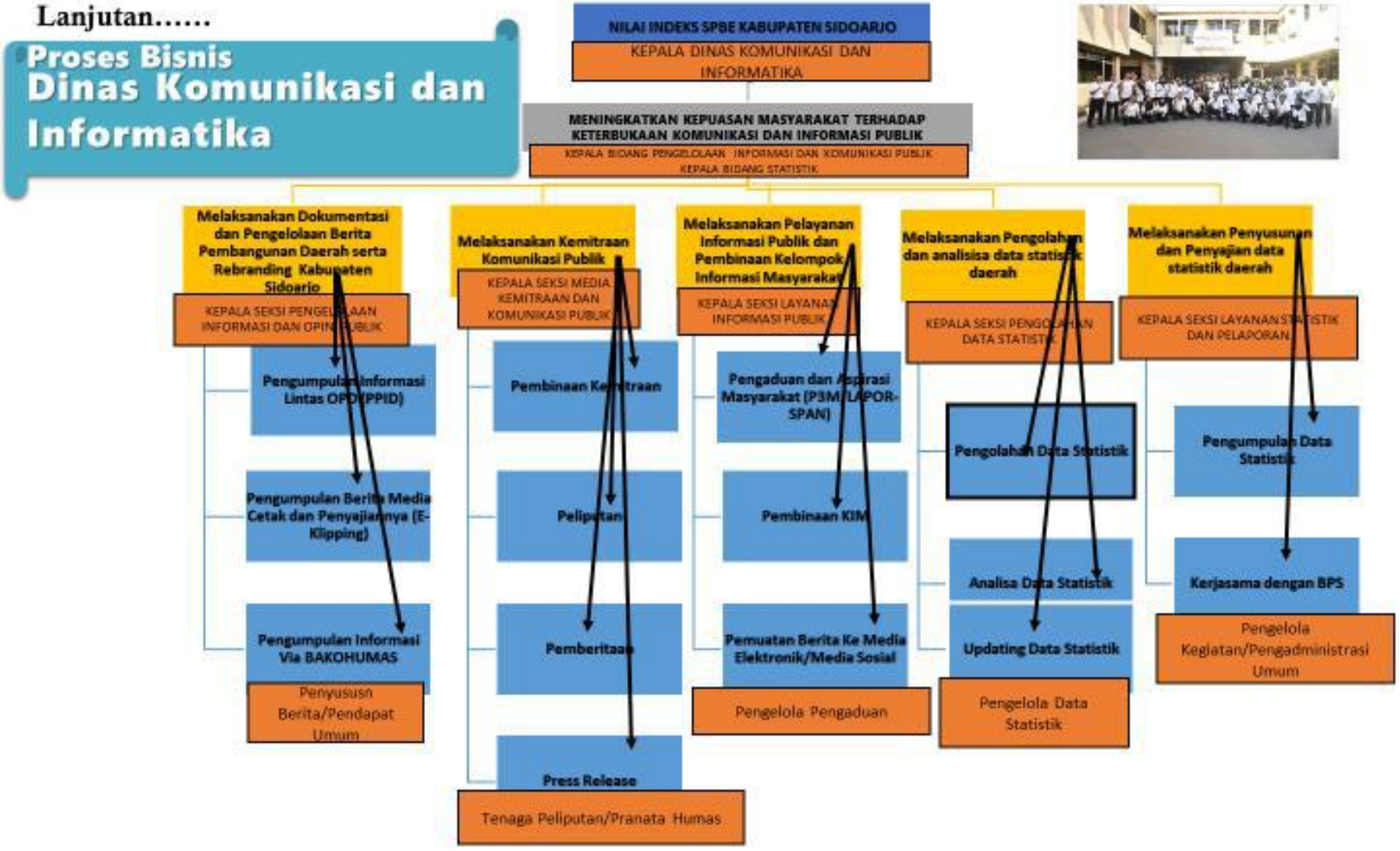
Proses Bisnis
Dinas Komunikasi dan Informatika
NILAI INDEKS SPBE KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEPALA BIDANG STATISTIK
Melaksanakan Dokumentasi dan Pengelolaan Berita Pembangunan Daerah serta Rebranding Kabupaten Sidoarjo
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN OPINI PUBLIK
Pengumpulan Informasi Lintas OPD (PPID)
Pengumpulan Berita Media Cetak dan Penyajiannya (E-Klipping)
Pengumpulan Informasi Via BAKOHUMAS
Penyususn Berita/Pendapat Umum
Melaksanakan Kemitraan Komunikasi Publik
KEPALA SEKSI MEDIA KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pembinaan Kemitraan
Peliputan
Pemberitaan
Press Release
Tenaga Peliputan/Pranata Humas
Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat (P3M/LAPOR-SPAN)
Pembinaan KIM
Pemuatan Berita Ke Media Elektronik/Media Sosial
Pengelola Pengaduan
Melaksanakan Pengolahan dan analisisa data statistik daerah
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA STATISTIK
Pengolahan Data Statistik
Analisa Data Statistik
Updating Data Statistik
Pengelola Data Statistik
Melaksanakan Penyusunan dan Penyajian data statistik daerah
KEPALA SEKSI LAYANAN STATISTIK DAN PELAPORAN
Pengumpulan Data Statistik
Kerjasama dengan BPS
Pengelola Kegiatan/Pengadministrasi Umum

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Dengan tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka didekati dengan pelayanan publik yang terintegrasi dengan internet dan data center. Pelayanan publik yang dimaksud merupakan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo termasuk desa atau kelurahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga, berdasar pada faktor internal fan faktor eksternal tersebut dapat dianalisis lebih

lanjut penentuan, pengambilan, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam perwujudan ketersediaan pelayanan berbasis teknologi informasi publik menuju Sidoarjo smartcity. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Tabel 5.1.
Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Faktor Lingkungan Internal
1. Kekuatan
a) Aspek Kelembagaan
1) Tersedianya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2) Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
3) Tersedianya Ren Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
b) Aspek Keuangan
1) Tersedianya anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
c) Aspek Teknis Operasional
1) Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
2) Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dalam

	pelaksanaan teknis operasional kegiatan pada masing-masing bidang
	3) Ketersediaan aplikasi pendukung sebagai penunjang teknis operasional pelayanan publik
d)	**Aspek Komunikasi**
	1) Adanya komunikasi yang baik dan lancar dalam bentuk komunikasi satu arah maupun dua arah antara sesama pegawai maupun dengan pimpinan
	2) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur/garis komando maupum instruksi kerja yang telah ditetapkan
	3) Tersedianya media publikasi yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui media cetak maupun eletronik
	4) Tersedianya media organisasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan informasi kepada publik
2.	**Kelemahan**
a)	**Aspek Kelembagaan**
	1) Beberapa tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 menimbulkan overlapping kewenangan terutama di seksi pengolahan data dan integrasi sistem informasi
	2) Perlu evaluasi renstra secara menyeluruh agar lebih efektif dan efisien
	3) Koordinasi antara daerah dan pusat yang kurang lancar dan memadai
b)	**Aspek Keuangan**

	1) Sistem penganggaran pemerintah tidak dapat mengikuti fluktuasi harga perangkat tekonologi informasi dan komunikasi yang masih impor dan mengikuti nilai dolar
	2) Masih terdapat anggaran keuangan yang belum tanggap dan belum terserap dengan maksimal di beberapa seksi
	3) Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
c)	**Aspek Teknis Operasional**
	1) Kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana baik gedung, sarana mobilitas komunikasi dan teknologi informasi
	2) Kurangnya sarana prasarana baik gedung maupun sarana mobilitas komunikasi dan teknologi informasi
d)	**Aspek Komunikasi**
	1) Masih lemahnya koordinasi keterbukaan informasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan lainnya
	2) Belum disusunnya Standar Operasional Prosedur untuk penyediaan aplikasi dan pengelolaan website
	3) Masih adanya sifat ego sektoral di dalam meninjau program dan kegiatan bidang
e)	Aspek Sumber Daya Manusia
	1) Terbatasnya kualitas SDM yang berlatar belakang IT dan pemahaman terhadap TIK

Faktor Lingkungan Eksternal

1)	Peluang
a)	Aspek Kelembagaan
	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
	3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
5) Adanya kerjasama/MOU dengan pihak ketiga yaitu perusahaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
6) Sarana fasilitator penyebarluasan informasi kepada publik

b) Aspek Keuangan

1) Dukungan dana dari pihak-pihak terkait sebagai relasi rekanan dalam kerjasama pengadaan barang
2) Kerjasama dengan lembaga penelitian sehingga dapat mengurangi biaya oprasional dan bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan

c) Aspek Sosial Budaya

1) Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik
2) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
3) Pengguna layanan/masyarakat sudah familiar dengan perangkat mobile (berbasis online)
4) Masyarakat membutuhkan data yang akurat untuk pngambilan keputusan sehingga tepat sasaran
5) Tingginya kebutuhan data oleh khalayak publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat

2. Ancaman

a) Aspek Teknsi Operasional

1) Jaringan internet yang tidak stabil sehingga aplikasi tidak dapat digunakan sesuai fungsinya
2) Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih yang tidak diimbangi dengan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik

3) Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan rawan serangan sistem hacker yang menganggu stabilitas ketersediaan sistem informasi

b) Aspek Sosial Budaya

1) Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan teknologi informasi komunikasi
2) Keakuratan publikasi data yang diragukan oleh publik menyebabkan pengguna layanan apatis terhadap keterbukaan data yang diberikan oleh pemerintah daerah
3) Timbulnya keraguan publik karena semakin maraknya informasi-informasi dari berita hoax atau tidak bertanggung jawab
4) Kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang lebih banyak di wilayah pedesaan daripada perkotaan menyebabkan sulitnya akses penyebaran teknologi informasi komunikasi
5) Cepatnya perkembangan teknologi dan informasi dan arus informasi yang arus diterima masyarakat namun belum difilter terlebih dahulu

Strategi-Strategi	
1.	Meningkatkan jaringan teknologi informasi serta mengembangkan aplikasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik
2.	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik
3.	Menyediakan layanan akses internet dan intranet untuk organisasi perangkat daerah lainnya dan ruang publik
	Menyediakan fasilitas hosting dan *co-location server* di desa center
4.	Mengintegrasikan data-data layanan organisasi perangkat daerah di *datawarehouse* untuk sistem informasi
5.	Melakukan update dan upgrade sistem tekonologi informasi

	komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien pada publik
6.	Mengintegrasikan pelatihan dan penambahan wawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun kompetensi dari lingkup internal maupun eksternal dalam mewujudkan masyarakat berbudaya tekonologi informasi
7.	Melakukn kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mendukung perwujudan program smart city
8.	Penguatan komitmen di lingkungan internal dalam rangka peningkatan etos kerja maupun kinerja yang seoptimal mungkin
9.	Peningkatan dalam penyediaan keberagaman data statistic sektoral
10.	Pembentukan forum data sehingga memudahkan dalam koordinasi keterbukaan informasi data bagi publik

Identifikasi strategi-strategi pengembangan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo diatas bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelayanan publik yang terintegrasi dengan internet dan data center. Tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya ketersediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif khususnya pada keterbukaan informasi publik. Informasi publik berpengaruh terhadap penilaian kinerja publik pada implementasi kebijakan-kebijkan daerah yang tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

5.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoajo adalah:

1. Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan cakupan OPD dalam mengembangkan Sistem aplikasi e-goverment;
3. Mengembangkan publikasi melalui sistem yang dibangun berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data yang disajikan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
MISI 1: Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smart city	1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan jaringan teknologi informasi serta mengembangkan aplikasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik	1. Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Meningkatkan cakupan OPD dalam mengembangkan Sistem aplikasi e-goverment 3. Mengembangkan publikasi melalui sistem yang dibangun berbasis teknologi informasi 4. Meningkatkan kepercayaan

VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
MISI 1: Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pengguna data terhadap kualitas data yang disajikan

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program dan Kegiatan
Meningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) a. Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK b. Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan comment center c. Pengelolaan data dan integrasi sistem informatika d. Monitoring dan Evaluasi e. Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK f. Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK
				Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi	
				Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi	

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program dan Kegiatan
					g. Pengelolaan, fasilitasi dan implementasi Teknologi Informatika a. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Teknologi informasi b. Pengelolaan fasilitasi aplikasi teknologi informatika c. Pengembangan dan pengelolaan website d. Pengelolaan, fasilitasi & implementasi pendaftaran layanan elektronik e. Monev kebijakan E-Gov f. Perumusan kebijakan tata kelola e-government
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan	Pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat a. Pengelolaan informasi dan opini publik

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program dan Kegiatan
			komunikasi dan informasi publik	informasi publik	b. Penyediaan media dan kemitraan komunikasi publik c. Layanan Informasi publik Pengembangan data informasi statistik daerah a. Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah b. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2017 – 2021 meliputi :

1. ***Program Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Data Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)*** terdiri dari :
   a. Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK
   b. Peningkatan sarpras dan infrastruktur TIK, Data Center dan command center
   c. Monitoring dan evaluasi
   d. Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
   e. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK
   f. Perencanaan dan Implementasi Persandian dan Keamanan TIK

2. ***Program Pengelolaan, Fasilitasi Dan Implementasi Teknologi Informatika*** terdiri dari *:*
   a. Pengelolaan Fasilitasi Aplikasi Teknologi Informatika
   b. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
   c. Pengembangan dan pengelolaan website

d. Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Pendaftaran Layanan Elektrtonik
e. Perumusan kebijakan tata kelola e-gov
f. Monitoring dan evaluasi kebijakan E-Gov

3. ***Program Pelayananan Informasi, Pemberitaan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat*** yang terdiri dari :
   a. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
   b. Penyediaan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik
   c. Layanan dan Informasi Publik

4. ***Program Pengembangan data informasi statistik daerah*** terdiri dari:
   a. Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
   b. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD Tahun 2017-2021

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	kondisi awal 2017	2018		2019		2020		2021	
					Indikator	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)				**2,55**	**2,55**	**19,149,257,000**	**2,6**	**21,130,394,800**	**2,65**	**23,199,226,904**	**2,7**	**25,472,076,157**
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi			**47%**	**58%**	**15,569,985,000**	**70%**	**17,192,911,800**	**81%**	**18,867,995,604**	**100%**	**20,707,721,727**
			Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi			**0%**	**24%**		**44%**		**64%**		**84%**	
			Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi			**0%**	**20%**		**40%**		**60%**		**80%**	
			Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase jaringan FO yang dibangun		**12%**	**35%**	**14,729,640,000**	**58%**	**16,246,724,200**	**81%**	**17,842,126,636**	**100%**	**19,595,198,928**
				Monitoring dan Evaluasi	Persentase aplikasi layanan publik OPD yang memanfaatkan database terintegrasi	20%	40%	6,300,000	60%	6,930,000	80%	7,623,000	100%	8,385,300
				Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK	Prosentase infrastruktur yang dibangun	29%	43%	2,836,615,000	57%	3,120,276,500	85,71%	3,432,304,150	100%	3,775,534,565
					Prosentase kebutuhan bandwith yang terpenuhi	0	28,70%	10,000,000	44,44%	12,000,000	72,22%	14,000,000	100%	14,000,000
				Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan comment center	Persentase tingkat aksesbilitas data center	24%	33%	9,941,500,000	50%	10,935,650,000	67%	12,029,215,000	100%	13,232,136,500
					Persentase Pengelolaan command center yang dapat berjalan dengan baik	1,28%	97,06%		98,25%		99,43%		100,00%	
				Pengelolaan data dan integrasi sistem informatika	Prosentase database OPD yang terintegrasi	14,29	11,00	107,995,000	14,00	118,794,50,0	17,00	130,673,950	20,00	143,741,345

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	kondisi awal 2017	2018		2019		2020		2021	
					Indikator	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
					Prosentase Sistem Informasi yang terintegrasi	0	11%	681,455.000	14%	749,600,500	17%	824,560,550	20%	907,016,605
				Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK	Prosentase keamanan Infrastruktur TIK yang dipantau	23,08%	97,00%	1,000,000,000	98,00%	1,200,000,000	99,00%	1,440,000,000	100,00%	1,728,000,000
				Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK	Persentase SOP persandian dan keamanan yang disusun	-	20%	151,500,000	40%	166,650,000	60%	183,315,000	100%	201,646,500
					Persentase keamanan TIK yang terpasang	50%	75%		100%		100%		100%	
			Pengelolaan , fasilitasi dan implementasi Teknologi Informatika	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center		**20%**	**40%**	**840,345,000**	**60%**	**946,187,600**	**80%**	**1,025,868,968**	**100%**	**1,112,522,799**
				Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Teknologi informasi	persentase aplikasi yang dapat terintegrasi	20%	40%	71,320,000	60%	82,018,000	80%	94,320,700	100%	108,468,805
				Pengelolaan fasilitasi aplikasi teknologi informatika	persentase aplikasi OPD yg dapat difasilitasi	20%	40%	152,425,000	60%	155,079,600	80%	116,094,768	100%	66,282,469
				Pengembangan dan pengelolaan website	Persentase website OPD dan layanan yang dihasilkan	20%	40%	244,150,000	60%	280,772,500	80%	322,888,375	100%	371,321,631
				Pengelolaan, fasilitasi & implementasi pendaftaran layanan eletronik	Persentase OPD yang terdaftar secara elektronik	20%	40%	70,350,000	60%	80,902,500	80%	93,037,875	100%	106,993,556
				Monev kebijakan E-Gov	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian SPBE	20%	40%	71,600,000	60%	82,340,000	80%	94,691,000	100%	108,894,650

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	kondisi awal 2017	2018		2019		2020		2021	
					Indikator	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
				Perumusan kebijakan tata kelola e-goverment	Persentase Jumlah kebijakan yang dihasilkan	20%	40%	230,500,000	60%	265,075,000	80%	304,836,250	100%	350,561,688
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik			**75**	**77**	**1,397,975,000**	**79**	**1,537,772,500**	**81**	**1,691,549,750**	**83**	**1,860,704,725**
			Pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi		**80**	**81**	**1,397,975,000**	**82**	**1,537,772,500**	**83**	**1,691,549,750**	**84**	**1,860,704,725**
				Pengelolaan informasi dan opini publik	Presentase konten berita yang dibuat dan dipublikasi	50%	24%	248,000,000	48%	272,800,000	72%	300,080,000	100%	330,088,000
				Penyedia an media dan kemitraan komunikasi publik	Persentase humas dan lembaga yang bermitra dengan DISKOMINFO	80%	80%	746,175,000	85%	820,792,500	90%	902,871,750	95%	993,158,925
				Layanan Informasi publik	Persentase pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti	64%	68%	403,800,000	72%	444,180,000	76%	488,598,000	80%	537,457,800
					Persentase KIM yang dibina	20%	40%		60%		80%		100%	
			Pengembangan data informasi statistik daerah	Persentase data statistik yang diolah dan di analisa		**20%**	**40%**	**548,252,000**	**60%**	**603,077,200**	**80%**	**663,384,920**	**100%**	**729,723,412**
				Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah	Persentase data yang diolah dan di analisa	18	36	116,064,000	54	127,670,400	72	140,437,440	90	154,481,184
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Persentase elemen data yang disajikan	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	432,188,000	1 Sosialisasi	475,406,800	1 Sosialisasi	522,947,480	1 Sosialisasi	575,242,228

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	kondisi awal 2017	2018		2019		2020		2021	
					Indikator	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
						1 kali di Media Elektronik	1 kali di Media Elektronik		2 kali di Media Elektronik		3 kali di Media Elektronik		4 kali di Media Elektronik	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat kepuasan aparatur		**100%**	**100%**	**973,510,000**	**100%**	**1,070,861,000**	**100%**	**1,177,947,100**	**100%**	**1,295,741,810**
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk	100%	100%	3,900,000	100%	4,290,000	100%	4,719,000	100%	5,190,900
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	biaya rekening listrik, air, telepon	12 bulan	12 bulan	304,000,000	12 bulan	334,400,000	12 bulan	367,840,000	12 bulan	404,624,000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perijinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	33,500,000	12 bulan	36,850,000	12 bulan	40,535,000	12 bulan	44,588,500
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelolah adm keuangan	12 bulan	12 bulan	175,560,000	12 bulan	193,116,000	12 bulan	212,427,600	12 bulan	233,670,360
				Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	Tersedianya jasa kebersihan kantor	24 orang	24 orang	106,000,000	24 orang	116,600,000	24 orang	128,260,000	24 orang	141,086,000
				Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan jumlah ATK yang disediakan	100%	100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	19,000,000	100%	20,900,000	100%	22,990,000	100%	25,289,000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	6,000,000	1 paket	6,600,000	1 paket	7,260,000	1 paket	7,986,000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	7,000,000	12 bulan	7,700,000	12 bulan	8,470,000	12 bulan	9,317,000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM	12 bulan	12 bulan	251,300,000	12 bulan	276,430,000	12 bulan	304,073,000	12 bulan	334,480,300

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	kondisi awal 2017	2018		2019		2020		2021	
					Indikator	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu	2375 kotak	2375 kotak	37,250,000	2375 kotak	40,975,000	2375 kotak	45,072,500	2375 kotak	49,579,750
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi		**100%**	**100%**	**521,000,000**	**100%**	**573,100,000**	**100%**	**630,410,000**	**100%**	**693,451,000**
				Pengadaan meubeleur	persentase meubeler yang diadakan	100%	100%	142,000,000	100%	156,200,000	100%	171,820,000	100%	189,002,000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	100,000,000	12 bulan	110,000,000	12 bulan	121,000,000	12 bulan	133,100,000
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 tahun	279,000,000	12 tahun	306,900,000	12 tahun	337,590,000	12 tahun	371,349,000
			Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase aparatur yang disiplin		**100%**	**100%**	**22,810,000**	**100%**	**25,091,000**	**100%**	**27,600,100**	**100%**	**30,360,110**
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	persentase pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	100%	100%	18,810,000	100%	20,691,000	100%	22,760,100	100%	25,036,110
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	persentase pakaian khusus diadakan	100%	100%	4,000,000	100%	4,400,000	100%	4,840,000	100%	5,324,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tingkat kelulusan peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dikirim bersertifikat		**100%**	**100%**	**50,000,000**	**100%**	**55,000,000**	**100%**	**60,500,000**	**100%**	**66,550,000**
				Pendidikan dan pelatihan non formal	persentase pendidikan dan pelatihan non formal yang diadakan	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%	66,550,000
			Program peningkatan	Prosentase Jumlah Dokumen perencanaan, laporan keuangan		**100%**	**100%**	**65,725,000**	**100%**	**72,581,300**	**100%**	**79,839,430**	**100%**	**87,823,373**

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	kondisi awal 2017	2018		2019		2020		2021	
					Indikator	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP
			pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65,725,000	1 Laporan	72,581,300	1 Laporan	79,839,430	1 Laporan	87,823,373

Setelah dilakukan review rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2018 – 2021 meliputi :

1. ***Program Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Data Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)*** terdiri dari :
   a. Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK
   b. Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan command center
   c. Pengelolaan data dan integrasi sistem informatika
   d. Monitoring dan Evaluasi
   e. Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK
   f. Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK

2. ***Program Pengelolaan, Fasilitasi Dan Implementasi Teknologi Informatika*** terdiri dari *:*
   a. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Teknologi informasi
   b. Pengelolaan fasilitasi aplikasi teknologi informatika
   c. Pengembangan dan pengelolaan website
   d. Pengelolaan, fasilitasi & implementasi pendaftaran layanan eletronik
   e. Monev kebijakan E-Gov
   f. Perumusan kebijakan tata kelola e-government

3. ***Program Pelayananan Informasi, Pemberitaan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat*** yang terdiri dari :
   a. Pengelolaan informasi dan opini publik
   b. Penyediaan media dan kemitraan komunikasi publik
   c. Layanan Informasi publik

4. ***Program Pengembangan data informasi statistik daerah*** terdiri dari:
   a. Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah
   b. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

Serta program dan kegiatan rutin milik bidang Sekretariat yakni

5. ***Program Pelayanan Kesekretariatan*** yang terdiri dari :
   a. Penyediaan barang/jasa perkantoran
   b. Penyediaan barang/jasa perkantoran
   c. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
   d. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah
   e. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
   f. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
   g. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur
   h. Peningkatan kapasitas aparatur
   i. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
   j. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
   k. Penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan hasil Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, tidak terjadi perubahan jumlah program maupun kegiatan. Namun terjadi perubahan sasaran, indikator sasaran (IKU), target IKU, indikator program dan kegiatan berserta target program maupun kegiatan. Berikut merupakan matriks hasil review Renstra Diskominfo.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD Tahun 2019-2021

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)				**2.6**	**29,504,168,480**	**2.65**	**33,594,837,262**	**2.7**	**35,868,393,488**
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD yang terintegrasi			**70%**	**18,728,083,500**	**81%**	**21,376,989,475**	**100%**	**22,177,700,691**
			Persentase Jaringan Desa/ Kelurahan terintegrasi			**44%**		**64%**		**84%**	
			Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi			**40%**		**60%**		**80%**	
			Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase jaringan FO yang dibangun		**58.1%**	**17,489,131,000**	**81.4%**	**19,952,194,100**	**100%**	**20,539,186,010**
				Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK	Prosentase infrastruktur yang dibangun	57%	50,000,000	85.71%	50,000,000	100%	50,000,000
					Prosentase kebutuhan bandwidth yang terpenuhi	44.44%	12,000,000,000	72.22%	14,000,000,000	100%	14,000,000,000
				Peningkatan Sarpras dan infrastruktur TIK data center dan command center	Persentase tingkat aksesibilitas data center	99.694%	483,000,000	99.718%	555,450,000	99.742%	638,767,500
					Persentase Pengelolaan command center yang dapat berjalan dengan baik	98.25%	2,000,000,000	99.43%	2,000,000,000	100.00%	2,000,000,000
				Pengelolaan data dan integrasi sistem informatika	Prosentase database OPD yang terintegrasi	14%	749,600,500	17%	824,560,550	20%	907,016,605
					Prosentase Sistem Informasi yang terintegrasi	14%	749,600,500	17%	824,560,550	20%	907,016,605

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
				Monitoring dan Evaluasi	Persentase aplikasi layanan publik OPD yang memanfaatkan database terintegrasi	20%	6,930,000	30%	7,623,000	40%	8,385,300
				Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur TIK	Prosentase keamanan Infrastruktur TIK yang dipantau	98.00%	1,200,000,000	99.00%	1,440,000,000	100.00%	1,728,000,000
				Perencanaan dan implementasi Persandian dan Keamanan TIK	Persentase SOP persandian dan keamanan yang disusun	33.33%	50,000,000	66.67%	50,000,000	100%	100,000,000
					Persentase keamanan TIK yang terpasang	60%	200,000,000	80%	200,000,000	100%	200,000,000
			Pengelolaan, fasilitasi dan implementasi Teknologi Informatika	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center		**60%**	**1,238,952,500**	**80%**	**1,424,795,375**	**100%**	**1,638,514,681**
				Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Teknologi informasi	Persentase aplikasi yang dapat terintegrasi	60%	253,000,000	80%	290,950,000	100%	334,592,500
				Pengelolaan fasilitasi aplikasi teknologi informatika	Persentase aplikasi OPD yg dapat difasilitasi	60%	251,792,500	80%	289,561,375	100%	332,995,581
				Pengembangan dan pengelolaan website	Persentase website OPD dan layanan yang dihasilkan	60%	280,772,500	80%	322,888,375	100%	371,321,631

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
				Pengelolaan, fasilitasi & implementasi pendaftaran layanan eletronik	Persentase OPD yang terdaftar secara elektronik	60%	92,747,500	80%	106,659,625	100%	122,658,569
				Monev kebijakan E-Gov	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian PeGI	30%	90,620,000	45%	104,213,000	60%	119,844,950
				Perumusan kebijakan tata kelola e-government	Persentase Jumlah kebijakan yang dihasilkan	60%	270,020,000	80%	310,523,000	100%	357,101,450
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik			**79.00**	**7,001,447,450**	**81.00**	**7,914,143,162**	**83.00**	**8,866,207,478**
			Pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi		**82.00**	**1,324,472,500**	**83.00**	**1,455,919,750**	**84.00**	**1,600,511,725**
				Pengelolaan informasi dan opini publik	Presentase konten berita yang dibuat dan dipublikasi	48	59,500,000	72	64,450,000	100	69,895,000
				Penyediaan media dan kemitraan komunikasi publik	Persentase media yang bermitra dengan pemerintah kabupaten	85%	820,792,500	90%	902,871,750	95%	993,158,925
				Layanan Informasi publik	Persentase pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti	72%	444,180,000.00	76%	488,598,000.00	80%	537,457,800
					Persentase KIM yang dibina	60%		80%		100%	

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
			Pengembangan data informasi statistik daerah	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa		**60%**	**663,384,920**	**80%**	**729,723,412**	**100%**	**802,695,753**
				Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah	Persentase data yang diolah dan dianalisa	60%	140,437,440	80%	154,481,184	100%	169,929,302
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Persentase elemen data yang disajikan	40%	522,947,480	70%	575,242,228	86%	632,766,451
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		**100%**	**5,013,590,030**	**100%**	**5,728,500,000**	**100%**	**6,463,000,000**
				Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2000 buah	1,770,590,030	2000 buah	1,800,000,000	2000 buah	1,900,000,000
					Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	180 orang/ bulan		180 orang/ bulan		180 orang/ bulan	
					Jumlah BBM yang disediakan	25000 liter		25000 liter		25000 liter	
					Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	19 unit		19 unit		19 unit	
					Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	2500 Kotak		2500 Kotak		2500 Kotak	
					Rekening listrik, air, telepon dan internet yang	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
					terbayar						
					Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	10.000.000 Premi/ Bulan		12.000.000 Premi/ Bulan		14.000.000 Premi/ Bulan	
					Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	13 buah		13 buah		13 buah	
					Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	75 buah		75 buah		75 buah	
					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Buah		7 Buah		9Buah	
					Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	40 buah		40 buah		40 buah	
					Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	60 Orang/ bulan		60 Orang/ bulan		60 Orang/ bulan	
					Jumlah jam lembur yang terbayar	3600 Jam		3600 Jam		3600 Jam	
				Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	450,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
				Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,000,000
				Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/ rumah jabatan/ dinas yang dibangun	1 Unit	2,000,000,000	1 Unit	2,500,000,000	1 Unit	3,000,000,000
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	3 Unit		3 Unit		3 Unit	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang diadakan	150 Unit		150 Unit		150 Unit	
					Jumlah luas gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang direhab sedang/ berat	500 M2		500 M2		500 M2	
				Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang dipelihara	500 M2	300,000,000	500 M2	350,000,000	500 M2	400,000,000
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	19 Unit		21 Unit		24 Unit	

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang dipelihara	15 Unit		15 Unit		15 Unit	
				Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	60 Buah	30,000,000	60 Buah	33,000,000	60 Buah	35,000,000
					Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	60 Buah		60 Buah		60 Buah	
				Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek	10 Orang	150,000,000	12 Orang	155,000,000	15 Orang	160,000,000
					Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/seminar	20 Orang		20 Orang		20 Orang	
				Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 Dok	300,000,000	4 Dok	325,000,000	4 Dok	350,000,000
					Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 Dok		4 Dok		4 Dok	

Sasaran RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021	
					Indikator	Target	RP	Target	RP	Target	RP
					Jumlah data dan informasi yang disusun	4 Dok		4 Dok		4 Dok	
				Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 Dok	3,000,000	4 Dok	4,000,000	4 Dok	5,000,000
					Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 Dok		1 Dok		1 Dok	
					Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
				Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	7,000,000

Gambar 6.1
Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

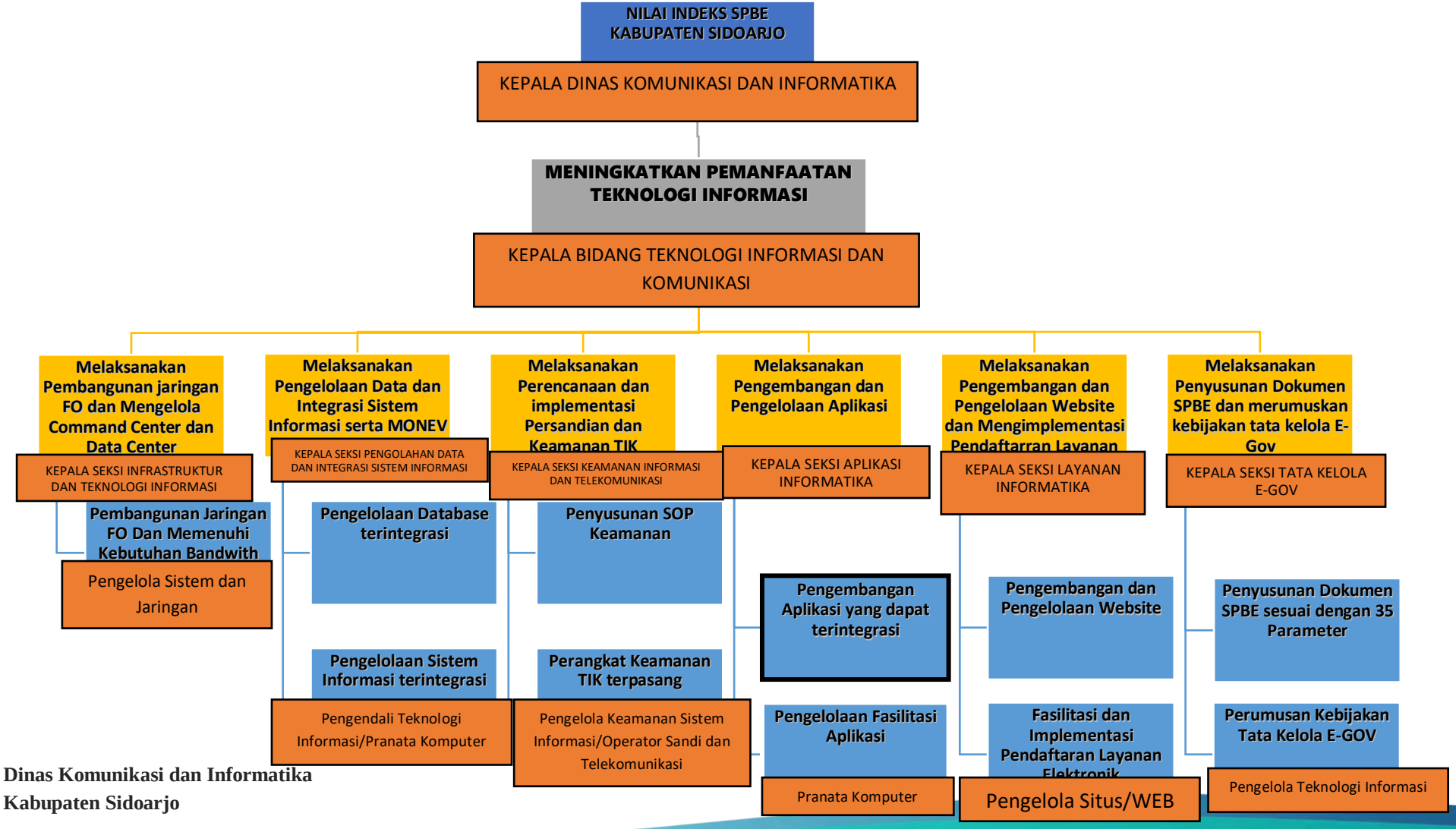

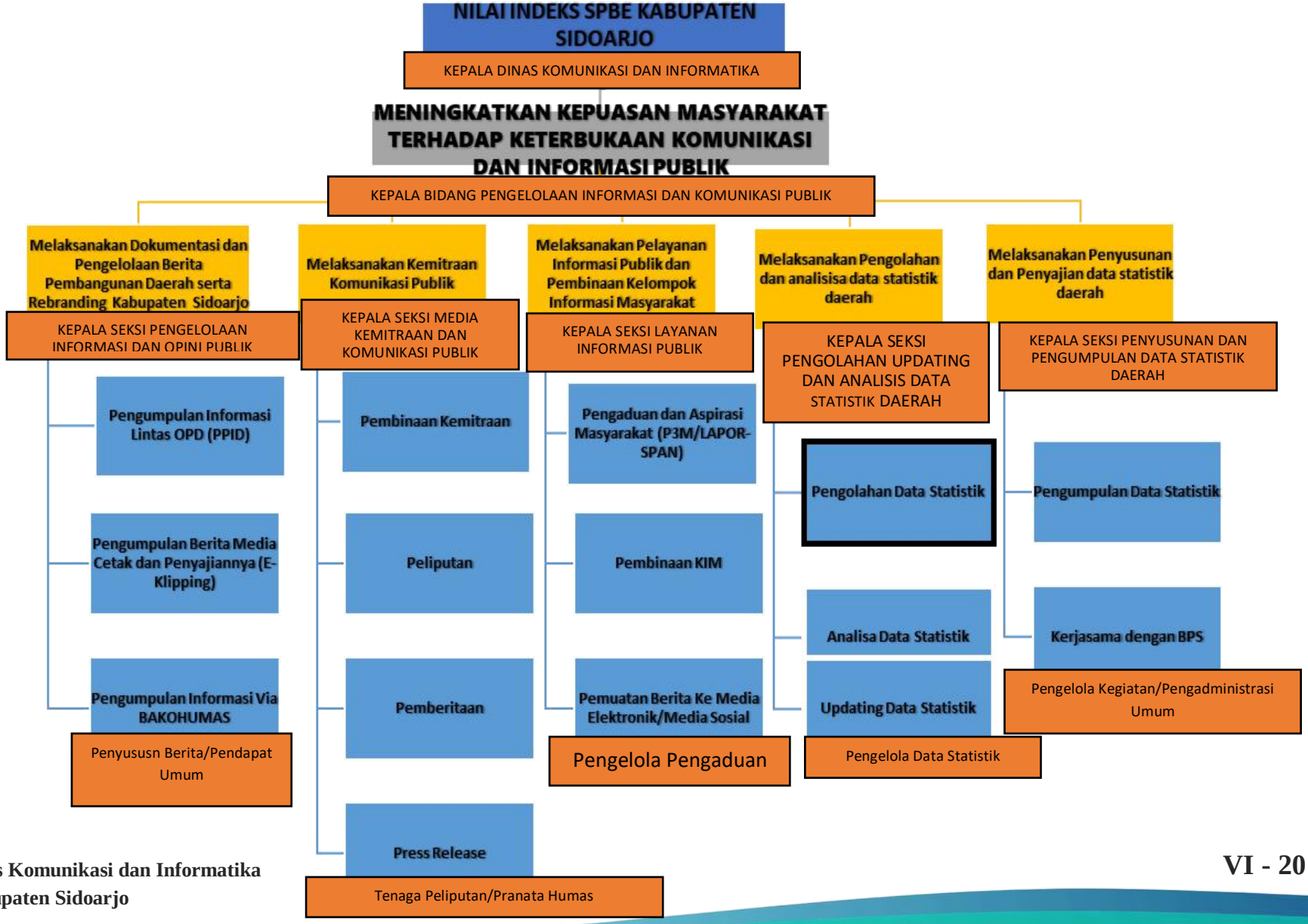
NILAI INDEKS SPBE KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Melaksanakan Dokumentasi dan Pengelolaan Berita Pembangunan Daerah serta Rebranding Kabupaten Sidoarjo
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN OPINI PUBLIK
Pengumpulan Informasi Lintas OPD (PPID)
Pengumpulan Berita Media Cetak dan Penyajiannya (E-Klipping)
Pengumpulan Informasi Via BAKOHUMAS
Penyususn Berita/Pendapat Umum
Melaksanakan Kemitraan Komunikasi Publik
KEPALA SEKSI MEDIA KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pembinaan Kemitraan
Peliputan
Pemberitaan
Press Release
Tenaga Peliputan/Pranata Humas
Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat (P3M/LAPOR-SPAN)
Pembinaan KIM
Pemuatan Berita Ke Media Elektronik/Media Sosial
Pengelola Pengaduan
Melaksanakan Pengolahan dan analisisa data statistik daerah
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN UPDATING DAN ANALISIS DATA STATISTIK DAERAH
Pengolahan Data Statistik
Analisa Data Statistik
Updating Data Statistik
Pengelola Data Statistik
Melaksanakan Penyusunan dan Penyajian data statistik daerah
KEPALA SEKSI PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH
Pengumpulan Data Statistik
Kerjasama dengan BPS
Pengelola Kegiatan/Pengadministrasi Umum

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah misi pertama yakni Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif dan Transparan. Dengan tujuan RPJMD yakni Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021 sebelumnya yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1.

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi									
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD*	Target capaian kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi		47%	58%	70%	81%	100%	100%
		Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi		0%	24%	44%	64%	84%	84%
		Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi		0%	20%	40%	60%	80%	80%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan		75	77	79	81	83	83

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi									
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD*	Target capaian kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
	publik	informasi publik							

**) : Tidak Tersedia dikarenakan OPD Baru*

Sedangkan setelah dilakukan review renstra, Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021 yaitu :

"Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo *Smartcity*"

tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran. Sasaran Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi* dan *Meningkatnya pengembangan dan keterbukaan komunikasi, informasi publik*. Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada RPJMD dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tertuang dalam Tabel 7.2.

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi								
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian kinerja				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	47%	58%	70%	81%	100%	100%
		Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi	0%	24%	44%	64%	84%	84%
		Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi	0%	20%	40%	60%	80%	80%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan	75	77	79	81	83	83

	komunikasi dan informasi publik	informasi publik						

Tabel 7. 3
Formulasi Perhitungan IKU Diskominfo

Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama PD (IKU OPD)	Formulasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	Jumlah OPD dan kecamatan yg terkoneksi dengan data center ---------- X 100% Jumlah OPD di Kabupaten Sidoarjo x 100 %
	Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi	Jumlah desa dan kelurahan yang terkoneksi dengan data center ---------- X 100% Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi ---------- X 100% Total Aplikasi

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik

POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO

| LEVEL BUPATI | LEVEL KEPALA OPD / ESELON 2 | | |

LEVEL BUPATI	LEVEL KEPALA OPD / ESELON 2															ESELON 3										
Keterkaitan SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL	TARGET					SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL	TARGET					PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				17	18	19	20	21				17	18	19	20	21					17	18	19	20	21	
																	Pengelolaan , fasilitasi dan implementasi Teknologi Informatika	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center	Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center ----------X100% Total Aplikasi	20%	40%	60%	80%	100%	Kepala Bidang Pengembangan Informatika
									Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	75	77	79	81	83	Pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Meningkatnya pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	Penghitungan Indeks Kepuasan masyarakat Penerima layanan Informasi (Monitoring Media Cetak, Kliping, Majalah Gema Delta, dll.) dengan menggunakan Kuesioner/Aplikasi	80	81	82	83	84	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

ESELON 4																		
KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR				kondisi awal 2017		2018		2019		2020		2021		PENANGGUNG JAWAB
		Indikator	formulasi	Satuan	Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Teknologi informasi	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Teknologi informasi	persentase aplikasi yang dapat terintegrasi	jumlah aplikasi yang diintegrasi ----------X100% target aplikasi yang akan diintegrasi	%	aplikasi yang sudah ada 5 aplikasi baru 2/tahun --> 15 aplikasi	20%		40%	220,000,000	60%	253,000,000	80%	290,950,000	100%	334,592,500	Kepala Seksi Aplikasi Informatika
Pengelolaan fasilitasi aplikasi teknologi informatika	Terlaksananya Pengelolaan fasilitasi aplikasi teknologi informatika	persentase aplikasi OPD yg dapat difasilitasi	jumlah aplikasi yang difasilitasi ----------X100% target aplikasi difasilitasi	%	aplikasi yang sudah ada 5 aplikasi baru 2/tahun --> 15 aplikasi	20%	50,950,000	40%	218,950,000	60%	251,792,500	80%	289,561,375	100%	332,995,581	
Pengembangan dan pengelolaan website	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan website	Persentase website OPD dan layanan yang dihasilkan	Jumlah website yang dikelola ----------X100% Jumlah website OPD	%	15 website OPD	20%		40%	244,150,000	60%	280,772,500	80%	322,888,375	100%	371,321,631	Kepala Seksi Layanan Informatika
Pengelolaan, fasilitasi & imple-mentasi pendaftaran layanan eletronik	Terlaksananya Pengelolaan, fasilitasi & implementasi pendaftaran layanan eletronik	Persentase aplikasi OPD yang terdaftar secara elektronik	Jumlah aplikasi yang terdaftar ----------X100% Jumlah aplikasi keseluruhan yang ada di OPD	%	15 aplikasi yang terdaftar di kementerian kominfo	20%		40%	80,650,000	60%	92,747,500	80%	106,659,625	100%	122,658,569	
Monev kebijakan E-Gov	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penilaian SPBE	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian SPBE	Jumlah Indikator Penilaian SPBE yang dicapai ---------- X100% Jumlah Indikator Penilaian SPBE yang harus dipenuhi	%	-	20%		15%	78,800,000	30%	90,620,000	45%	104,213,000	60%	119,844,950	Kepala Seksi Tata Kelola E-Gov
Perumusan kebijakan tata kelola e-goverment	Terlaksananya Perumusan kebijakan tata kelola e-goverment	Persentase Jumlah kebijakan yang dihasilkan	Jumlah perbup yang dihasilkan ---------- X100% Jumlah target perbup dalam 5 tahun	%	5 perbup	20%		40%	234,800,000	60%	270,020,000	80%	310,523,000	100%	357,101,450	
Pengelolaan informasi dan opini publik	Terlaksananya Dokumentasi dan Pengelolaan Berita Pembangunan Daerah	Presentase konten berita yang dibuat dan dipublikasi	Jumlah konten yang dibuat ----------X100% Total Kewajiban Konten yang harus dibuat	%	29 OPD	50% permintaan : 3 yang dipenuhi : 3	45,000,000	24%	55,000,000	48	59,500,000	72	64,450,000	100	69,895,000	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
Penyediaan media dan kemitraan komunikasi publik	Meningkatnya Kemitraan Komunikasi Publik	Persentase humas dan lembaga yang bermitra dengan DISKOMINFO	Jumlah humas dan lembaga yang bermitra ----------X100% Total Humas dan lembaga di Kabupaten Sidoarjo	%	15 OPD: 3 LSM; - INSTANSI PUSAT; - INSTANSI PROV; 3 NON PEMERINTAHAN	80%	676,500,000	80%	746,175,000	85%	820,792,500	90%	902,871,750	95%	993,158,925	Kepala Seksi media dan kemitraan komunikasi publik
Layanan Informasi publik	Terlaksananya Layanan informasi publik	Persentase pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti/jumlah pengaduan yang masuk X 100%	%	TIDAK SAMA SETIAP TAHUN	64%	36,000,000.00	68%	403,800,000	72%	444,180,000.00	76%	488,598,000.00	80%	537,457,800.00	Kepala Seksi Layanan Informasi publik
		Persentase KIM yang dibina	Jumlah KIM yang dibina/jumlah KIM X 100%	%	5 KIM	20%	16,000,000.00	40%		60%		80%		100%		
Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah	Terlaksananya Pengolahan dan analisisa data statistik daerah	Persentase data yang diolah dan di analisa	Jumlah data yang diolah dan dianalisa ----------X100% Jumlah data statistik keseluruhan yang diolah dan dianalisa	dokumen	25 dokumen statistik	18	432,188,000.00	40%	127,670,400	60%	140,437,440	80%	154481184.00	100%	169,929,302	Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Penyajian data statistik daerah	Persentase elemen data yang disajikan	Jumlah elemen data yang disajikan ----------X100% Jumlah target elemen data yang disajikan	elemen data	500 elemen data	1 Sosialisasi 1 kali di Media Elektronik	116,064,000	30%	475,406,800	40%	522,947,480	70%	575,242,228	86%	632,766,451	Kepala Seksi Layanan Statistik dan Pelaporan